

Laporan National Kawula Survey Q2 2025

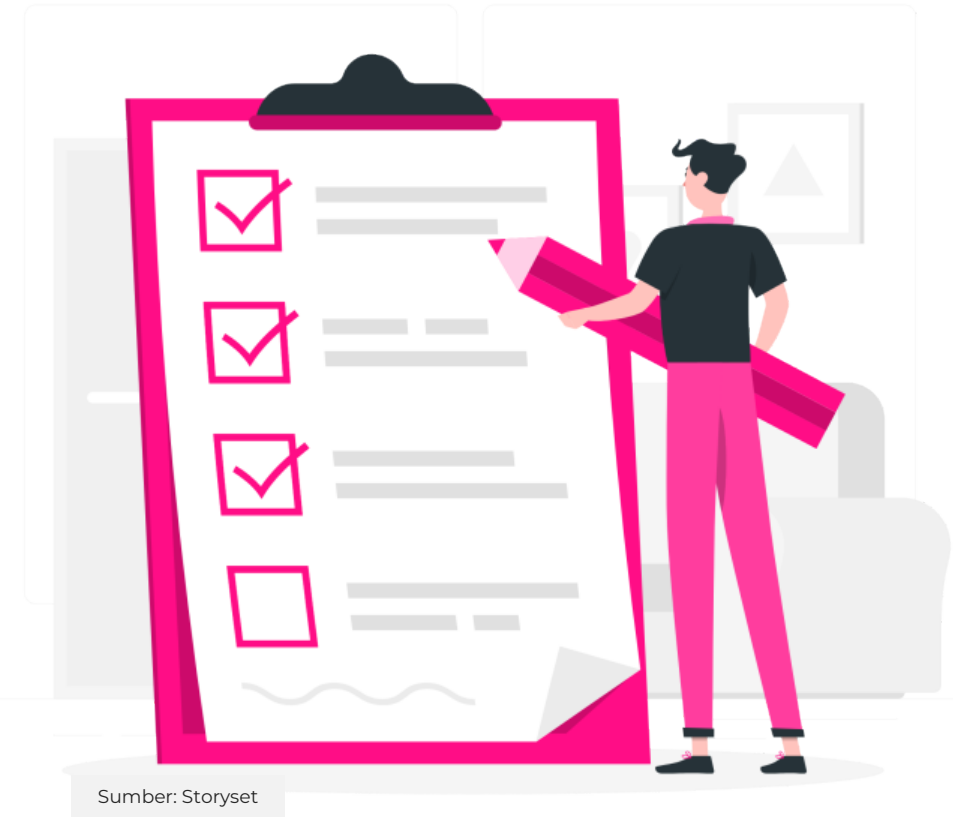


**Kinerja Pemerintah dan Legislatif serta
Opini Publik**



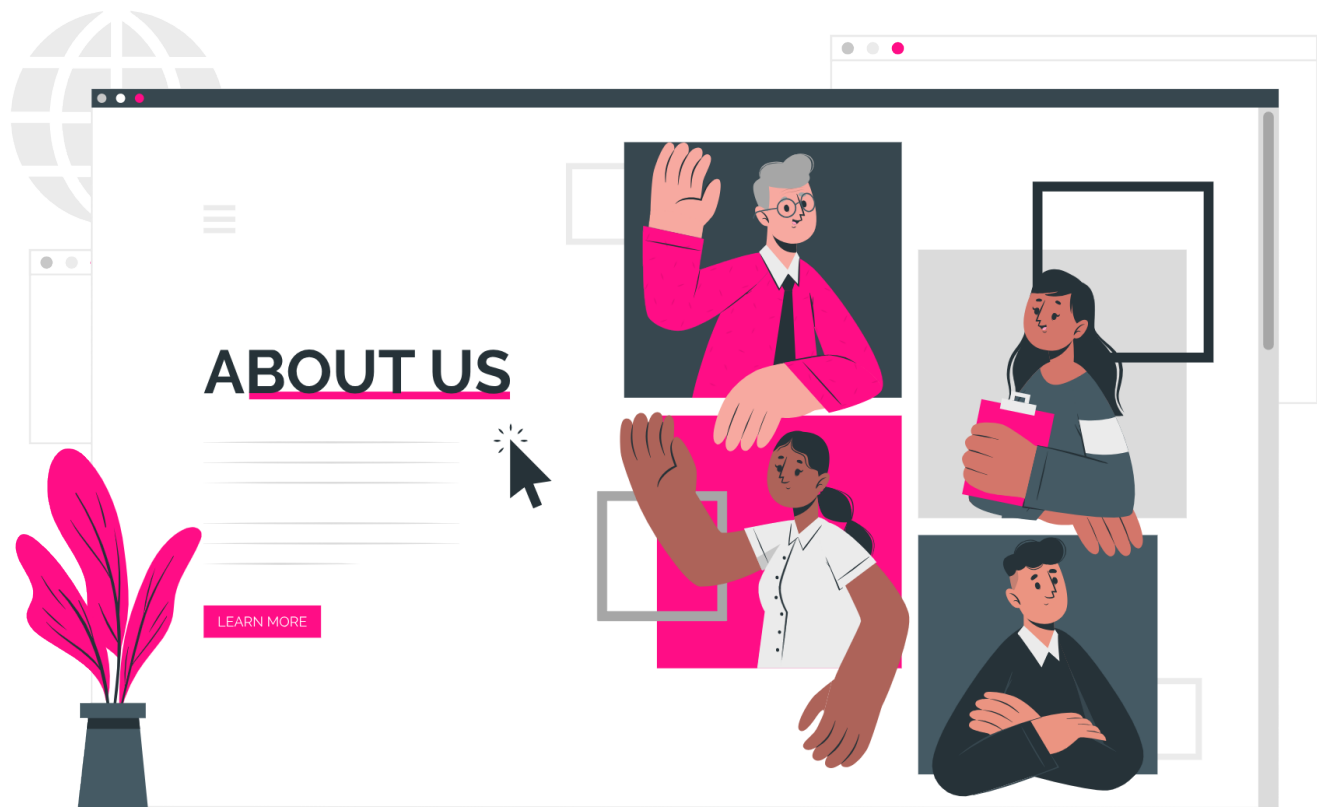
Daftar Isi

<u>Perkenalan.....</u>	3
<u>Metodologi.....</u>	6
<u>Temuan.....</u>	9
<u>Isu Prioritas.....</u>	12
<u>Penilaian Kinerja Pemerintah.....</u>	21
<u>Ekspektasi terhadap Pemerintahan.....</u>	26
<u>Pantauan Partai Politik.....</u>	37
<u>Opini Publik terhadap RUU Berjalan.....</u>	43
<u>Lampiran.....</u>	52





Perkenalan



Sumber: Storyset

Sekilas tentang Yayasan PP17

Apa itu Yayasan PP17?

Yayasan Pelopor Pilihan Tujuhbelas (PP17) lahir atas kekhawatiran sekaligus harapan kami untuk meningkatkan partisipasi anak muda di arena politik. Politik yang kami bayangkan tidak melulu tentang jalur formal, tetapi juga untuk memahami pilihan politik yang termanifestasi dalam pilihan hidup sehari-hari.

Dalam rangka meningkatkan partisipasi anak muda, PP17 memiliki beberapa inisiatif program, di antaranya adalah **Survei Nasional Kawula17** yang kami lakukan per kuartal untuk memantau partai politik dan pandangan masyarakat terhadap isu-isu terkini. Pemantauan regular ini dilakukan untuk memetakan dan memberikan gambaran yang representatif terhadap posisi masyarakat Indonesia terkait isu-isu terkini yang juga dibahas di DPR.

PP17 juga meluncurkan **Kawula17.id** yang merupakan [Voting Advice Application \(VAA\)](#). Melalui Kawula17.id, (calon) pemilih bisa melihat pilihan partai berdasarkan isu yang mereka usung. Isu-isu yang diangkat harus relevan terhadap kebutuhan pemilih dan dinamis.

Bagaimana [VAA Kawula17.id](#) bekerja?

Secara sederhana, VAA dapat diibaratkan seperti kuis yang terdiri dari beberapa set pertanyaan yang disediakan bagi para *users*. Pertanyaan-pertanyaan ini berisi isu maupun kebijakan yang saat ini sedang dibahas di DPR, serta ramai di kalangan publik. **Pemetaan posisi partai politik** dilakukan di masing-masing isu. Posisi ini didapatkan melalui **desk research** di portal berita maupun **konfirmasi langsung dengan perwakilan partai**.

Posisi-posisi partai teridentifikasi menjadi dasar pembuatan VAA. Dari jawaban-jawaban yang terkumpul, Kawula17 mencoba untuk **memetakan pilihan** publik dengan sikap partai politik di masing-masing isu yang tersedia. Hasil penelitian ini digunakan untuk menjaga VAA Kawula17 tetap *up to date*.



Tentang Survei Nasional Kawula17

National Kawula17 Survey (NKS) atau Survei Nasional Kawula17 bertujuan untuk mendorong diskusi, kesadaran masyarakat dan pemerintah terhadap kondisi terkini. Survei ini dipergunakan untuk menjadi basis pembuatan indeks pilihan partai dan untuk Kuis Pilihan Partai kuartal dua 2025.

NKS dilakukan empat kali dalam setahun atau per kuartal untuk melihat tren yang terjadi di masyarakat. Publikasi setiap laporan NKS dapat diakses melalui website **Kawula17.id**.

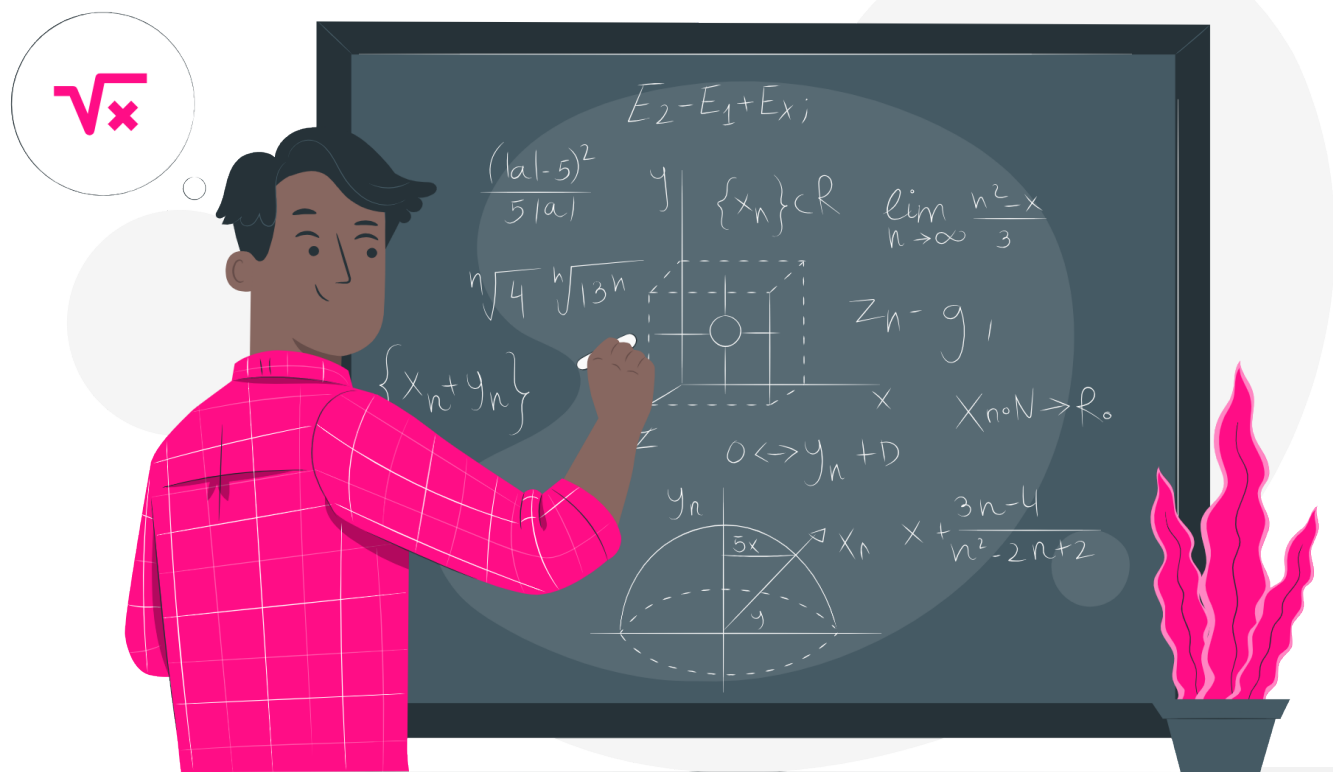
Pada kuartal kedua tahun ini, Kawula17 mempublikasikan laporan NKS yang berisi tentang:

1. Isu prioritas masyarakat.
2. Penilaian kinerja pemerintah.
3. Ekspektasi terhadap pemerintahan.
4. Pantauan partai politik.
5. Opini publik terkait beberapa RUU prolegnas.





Metodologi



Sumber: Storyset



Tujuan Penelitian

Memahami sikap masyarakat terhadap:

1. Isu terkini yang sedang berkembang
2. Persepsi masyarakat terhadap program dan kinerja pemerintah
3. Prioritas isu untuk segera diselesaikan
4. Persepsi Masyarakat terhadap beberapa RUU Prolegnas



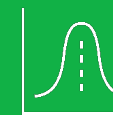
Periode Pengambilan Data

12 – 15 Mei 2025



Metodologi

Computer-Assisted Self Interviewing (CASI) atau survei daring



Sampling

n = 417 responden*
Umur: 17 – 44 tahun
Area: Indonesia

**representatif untuk Indonesia*

Profil Responden

base: all, n = 417*

Jenis kelamin

Laki-laki	51%
Perempuan	49%

Umur

17-24 tahun	30%
25-34 tahun	36%
35-44 tahun	34%

Pendidikan

SD/sedeajat	3%
SMP/sederajat	16%
SMA/sederajat	66%
Diploma	5%
Universitas	10%

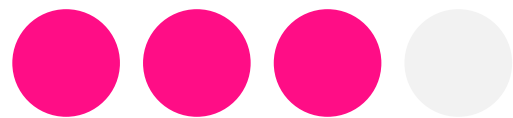
Wilayah

Sumatera	19%
Jawa	54%
Bali dan Nusa Tenggara	7%
Kalimantan	8%
Sulawesi	12%

Area

Perkotaan	73%
Pedesaan	27%

**Untuk memastikan hasil yang representatif bagi Indonesia, data telah diberi bobot berdasarkan jenis kelamin, usia, dan wilayah. Agar "effective base" optimal, faktor bobot dibuat di bawah 2.*



Temuan



Temuan ⁽¹⁾



Isu Prioritas Masyarakat

Isu ekonomi (52%) masih menjadi prioritas utama bagi masyarakat, konsisten sejak Q1 2025. Isu ini signifikan lebih penting bagi masyarakat di wilayah Jawa (62%) dibandingkan pulau lainnya. Di antara isu-isu prioritas lain, **korupsi (38%) menunjukkan peningkatan perhatian**, yang dapat disebabkan oleh banyaknya pemberitaan dan pengungkapan kasus korupsi belakangan ini. **Isu kemiskinan (34%)** juga mengalami kenaikan, beranjak dari urutan keenam pada Q1 menjadi keempat pada Q2.

Secara spesifik, tiga permasalahan yang paling mendesak untuk segera diselesaikan pemerintah masih berkaitan dengan isu ekonomi. Misalkan masalah **pengangguran (49%), korupsi (48%), dan mahal nya bahan pokok (43%)**. Jika dibandingkan dengan Q1, terdapat perubahan dalam perhatian masyarakat terhadap masalah prioritas. Mahalnya harga bahan pokok dan pengangguran tinggi konsisten masuk dalam urutan tiga besar, tetapi korupsi naik dari urutan keempat menjadi kedua.

Dalam konteks lingkungan, tiga isu teratas yang dianggap prioritas adalah **pengelolaan sampah tidak efisien (42%), banjir (41%), dan kurangnya ruang terbuka hijau (27%)**. Isu-isu teratas ini sedikit berbeda dengan kuartal sebelumnya, dimana pada Q1 2025 masalah prioritas terkait isu lingkungan adalah banjir dan kekeringan (58%), pengelolaan sampah tidak efisien (57%), serta pencemaran air (33%).



Pantauan Partai Politik

Hasil survei Q2 2025 menunjukkan bahwa **Partai Gerindra** masih mempertahankan posisinya sebagai pilihan teratas masyarakat. Secara umum, **tidak ada perubahan signifikan dalam preferensi partai politik dari Q1 ke Q2 2025**. Partai-partai non-parlemen pun masih belum ada yang berhasil memperoleh lebih dari 4% suara. Tingkat pengetahuan mengenai partai politik lebih rendah di kalangan kelompok usia paling muda (17-24 tahun) dibandingkan kelompok usia lainnya. Pengetahuan mengenai partai cenderung lebih tinggi di wilayah Jawa dan di daerah perkotaan.



Penilaian Kinerja Pemerintah

Pada kuartal kedua 2025, penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah menurun tajam pada isu **ekonomi dan korupsi**, dengan skor rata-rata hanya **2,5 dari 5** poin. Persepsi terhadap penanganan korupsi sedikit membaik, namun sentimennya masih cenderung negatif.

Ketidakpuasan terhadap program *non-quick win*, seperti **Coretax meningkat**. Selain itu, **kepuasan** atas program *quick win* seperti **MBG menurun secara signifikan**. **Masyarakat di Pulau Jawa dan pedesaan** menunjukkan **ketidakpuasan** terhadap kinerja pemerintah **paling tinggi** dibandingkan wilayah lain di Indonesia, khususnya terkait kondisi ekonomi dan korupsi.

Temuan (2)



Ekspektasi terhadap Pemerintah

Secara umum, masyarakat Indonesia masih menunjukkan keyakinan bahwa pemerintah akan mampu memenuhi program-programnya. Meski demikian, **keyakinan ini mengalami penurunan, dengan NET score keyakinan turun menjadi 10%**, menjadikannya yang **terendah dalam satu tahun terakhir**.

Perbedaan keyakinan juga terlihat berdasarkan demografi: laki-laki cenderung menunjukkan ketidakpercayaan, sementara perempuan secara signifikan lebih yakin terhadap kinerja pemerintah. Masyarakat dari kelompok usia yang lebih tua cenderung menunjukkan tingkat keyakinan yang moderat.

Alasan utama ketidakpercayaan masyarakat mencakup **korupsi (52%), kurangnya pejabat yang kompeten (30%), dan komunikasi pemerintah yang dianggap tidak efektif (24%)**. Di sisi lain, alasan keyakinan masyarakat adalah **pemberantasan korupsi (34%), karakter Prabowo (27%), serta hubungan dengan internasional (27%)**. Menariknya, isu pemberantasan korupsi muncul sebagai alasan keyakinan sekaligus ketidakpercayaan, yang kemungkinan dipengaruhi oleh interpretasi beragam terhadap berita-berita korupsi terjadi beberapa waktu lalu.

Perlu dicatat juga bahwa karakter Prabowo tidak lagi menjadi alasan utama keyakinan masyarakat, menunjukkan adanya pergeseran fokus atau pertimbangan lain dalam menilai kemampuan pemerintahan.



Opini Publik terhadap RUU Berjalan

Opini publik terhadap RUU yang sedang berjalan menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat berada di sisi yang sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan publik. Dari beberapa RUU Prolegnas yang ditanyakan, masyarakat paling mendukung **RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (42%)**.

Indeks partai politik relatif seragam, mencerminkan kesamaan posisi antarpolisi dalam menyikapi RUU yang ada. Minimnya perbedaan pendapat antarpolisi ini membuat **sulit membedakan sikap mereka** pada RUU yang berjalan. **Ketidaksesuaian justru terlihat antara aspirasi publik dan arah kebijakan pemerintah saat ini**.

Partai Politik	Skor Indeks Q2	Skor Indeks Q1
Partai Demokrat	37,8	35,5
Partai NasDem	37,8	61,0
PKB	37,6	61,0
PDIP	36,5	28,9
Partai Golkar	36,5	31,1
PKS	35,5	61,1
Partai Gerindra	31,7	46,2
PAN	27,9	35,6

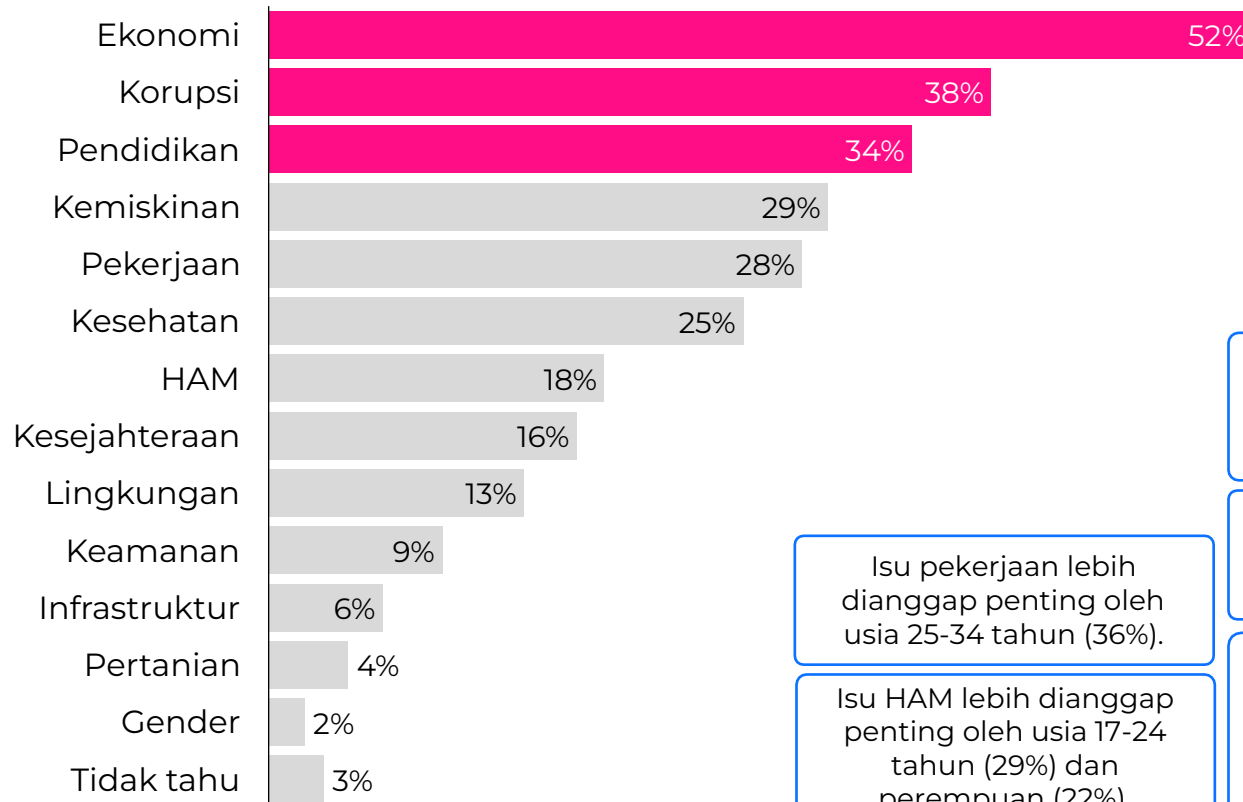


① Isu Prioritas

Ekonomi (52%) menjadi topik yang paling dianggap penting oleh masyarakat, diikuti oleh korupsi (38%) dan pendidikan (34%)

Topik Prioritas

base: semua, n=417



Isu ekonomi lebih dianggap penting oleh masyarakat di Jawa (62%).

Isu korupsi lebih dianggap penting oleh laki-laki (44%).

Isu pekerjaan lebih dianggap penting oleh usia 25-34 tahun (36%).

Isu HAM lebih dianggap penting oleh usia 17-24 tahun (29%) dan perempuan (22%).

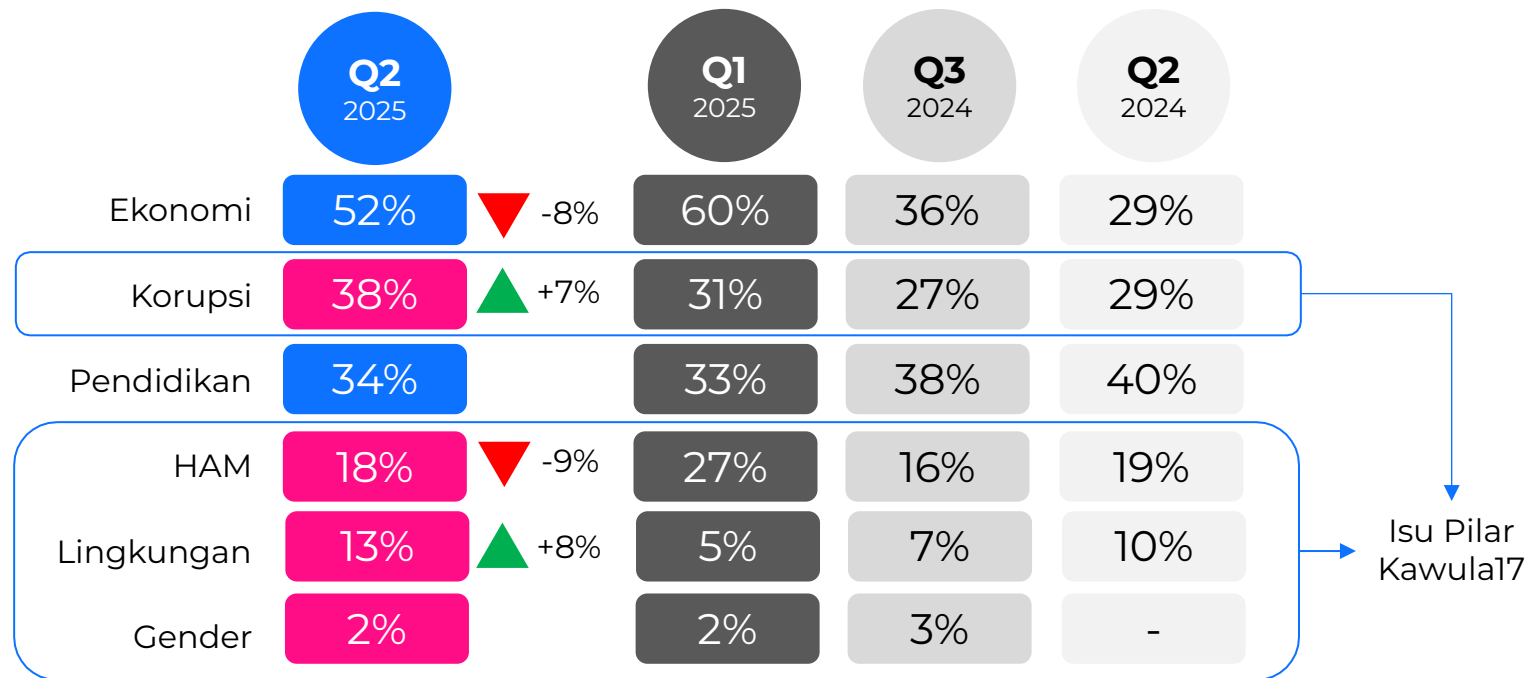
Isu pendidikan lebih dianggap penting oleh lulusan perguruan tinggi (52%) dan masyarakat di Sumatera (47%)..

Pada kuartar kedua tahun 2025, ekonomi (52%) menjadi topik yang paling dianggap penting oleh masyarakat. Meskipun menurun dari kuartar pertama tahun 2025 (60%), topik ini masih menjadi perhatian utama sebagian masyarakat, terutama mereka yang tinggal di pulau Jawa (62%).

Topik korupsi (38%) dan pendidikan (34%) menjadi dua topik teratas lainnya setelah ekonomi. Ketiga topik ini menjadi yang paling dianggap penting oleh masyarakat saat ini.

Topik korupsi dan lingkungan mengalami kenaikan signifikan dari Q1 ke Q2 2025

Topik Prioritas base: semua, n=417



Ekonomi (52%) masih jadi topik prioritas utama masyarakat di Q2 2025, meskipun terjadi penurunan secara persentase (-8%). Di sisi lain, topik korupsi mengalami kenaikan signifikan dari Q1 2025 (31%) ke Q2 2025 (38%). Topik lain yang juga mengalami kenaikan signifikan adalah lingkungan (+8%).

Kenaikan isu korupsi dan lingkungan mungkin dipengaruhi oleh terungkapnya dugaan kasus-kasus korupsi serta bencana lingkungan seperti banjir yang terjadi beberapa bulan lalu .

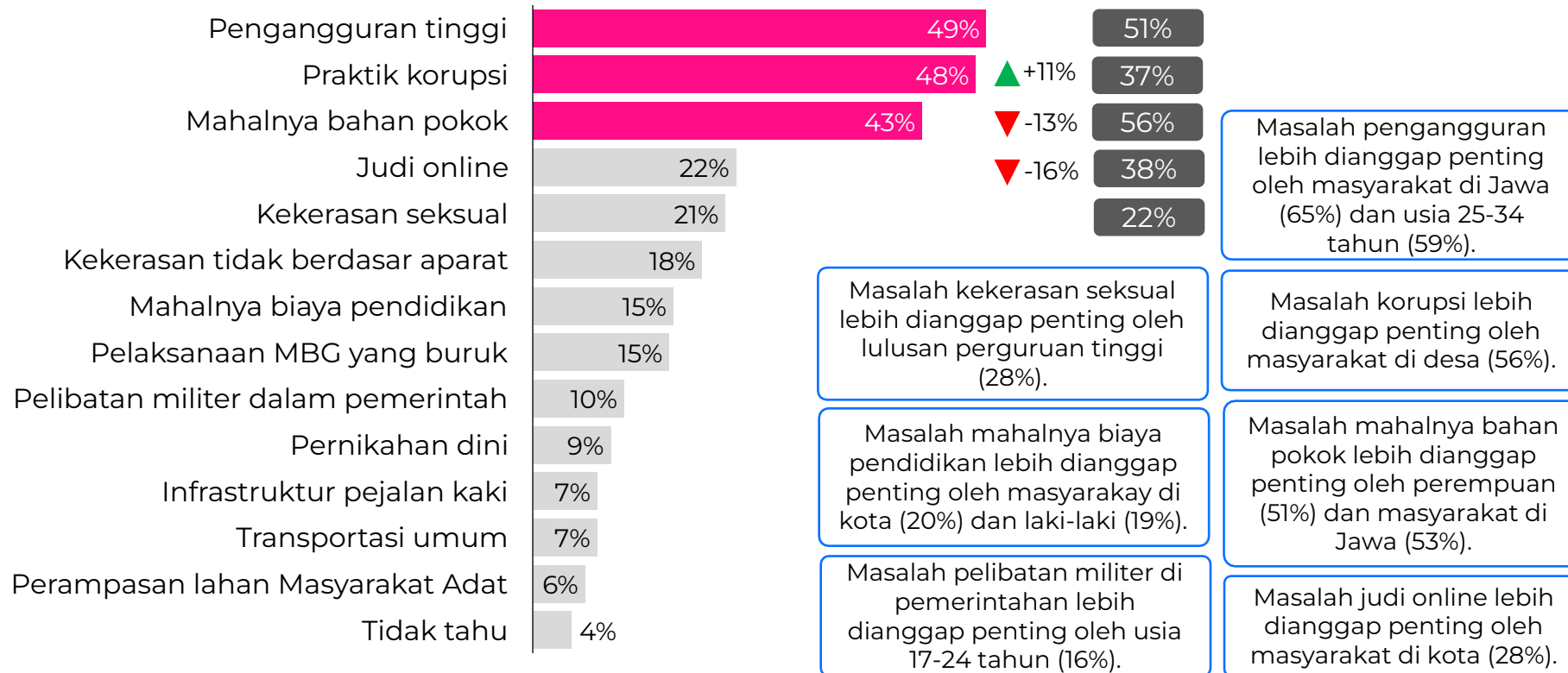
Selain itu, isu-isu yang menjadi pilar Kawula17 belum menjadi perhatian utama masyarakat.

Pengangguran tinggi (49%), maraknya praktik korupsi (48%), dan mahal nya harga bahan pokok (43%) merupakan tiga masalah utama pemerintah

Masalah Prioritas

base: semua, n=417

Q1
2025



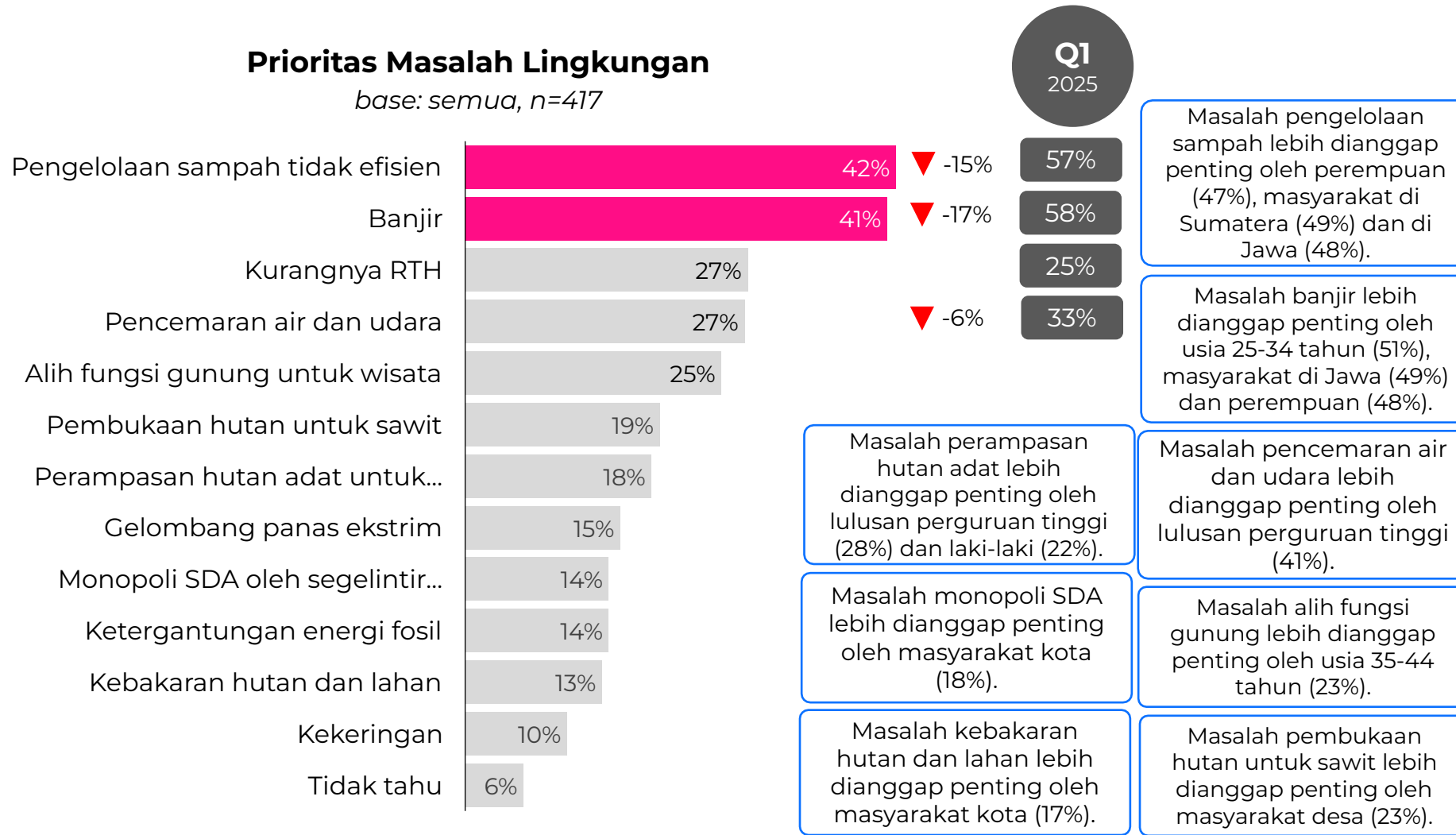
Masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi, seperti pengangguran (49%) dan mahal nya bahan pokok (43%) menjadi masalah-masalah prioritas masyarakat, terutama masyarakat di Jawa (65% dan 53%, secara berurutan).

Di sisi lain, praktik korupsi (48%) juga menjadi masalah utama pemerintah dengan kenaikan signifikan (+11%). Kenaikan perhatian masyarakat ini perlu menjadi perhatian pemerintah untuk segera diselesaikan.

Inefisiensi pengelolaan sampah (42%), diikuti banjir di posisi kedua (41%), merupakan masalah lingkungan yang dianggap prioritas

Prioritas Masalah Lingkungan

base: semua, n=417



Masalah pengelolaan sampah (42%) menjadi permasalahan lingkungan yang dianggap paling penting untuk segera diselesaikan, meskipun mengalami penurunan (-15%).

Di sisi lain, banjir (41%) menjadi masalah lain yang disorot masyarakat untuk segera diselesaikan, terutama oleh usia 25-34 tahun (51%), masyarakat di Jawa (49%), dan Perempuan (48%).

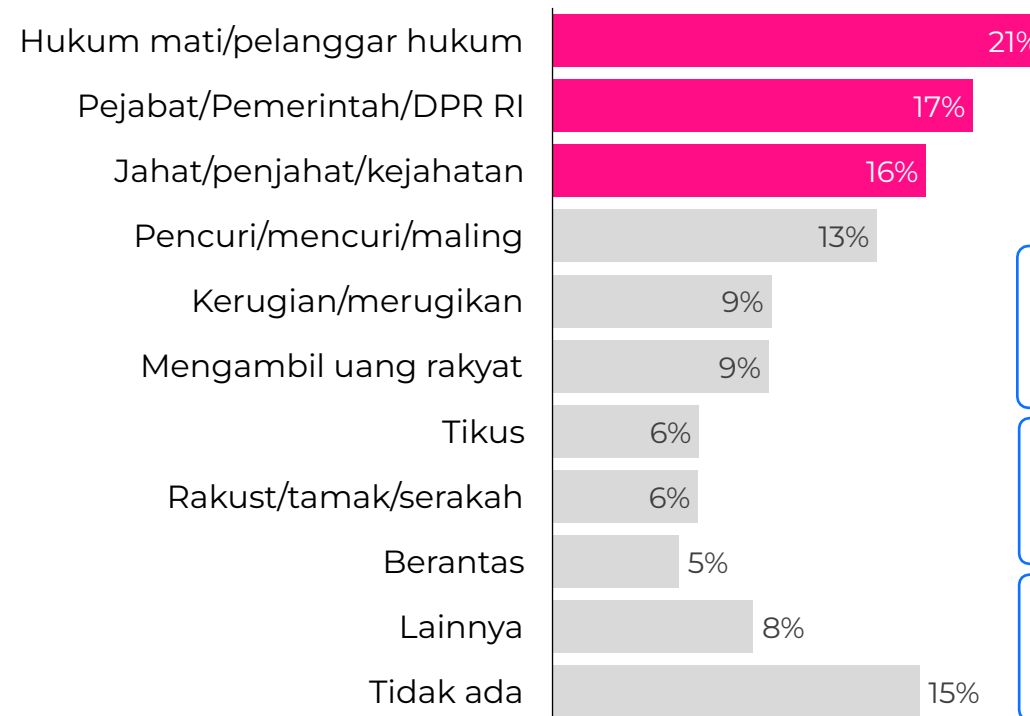
Masyarakat paling banyak mengasosiasikan 'korupsi' dengan hukuman mati (21%), diikuti oleh pejabat (17%) dan kejahatan (16%)

Kemampuan masyarakat lebih baik dalam mengasosiasikan kata "Korupsi" dibandingkan isu lain. Sama seperti Q1 2025, asosiasi "Hukuman mati/Melanggar hukum" (21%) tetap menjadi *top of mind*, khususnya masyarakat pedesaan (29%). Di sisi lain, temuan ini menggambarkan pemahaman masyarakat terhadap hak untuk hidup yang masih rendah.

Sementara itu, "Pejabat/Pemerintah/DPR RI" (17%) juga dominan. Di sisi lain, masyarakat perkotaan (17%) secara signifikan lebih banyak mengasosiasikan korupsi dengan "Mencuri/Maling" (13%).

Asosiasi Kata "Korupsi"

base: semua, n=417



Q1
2025

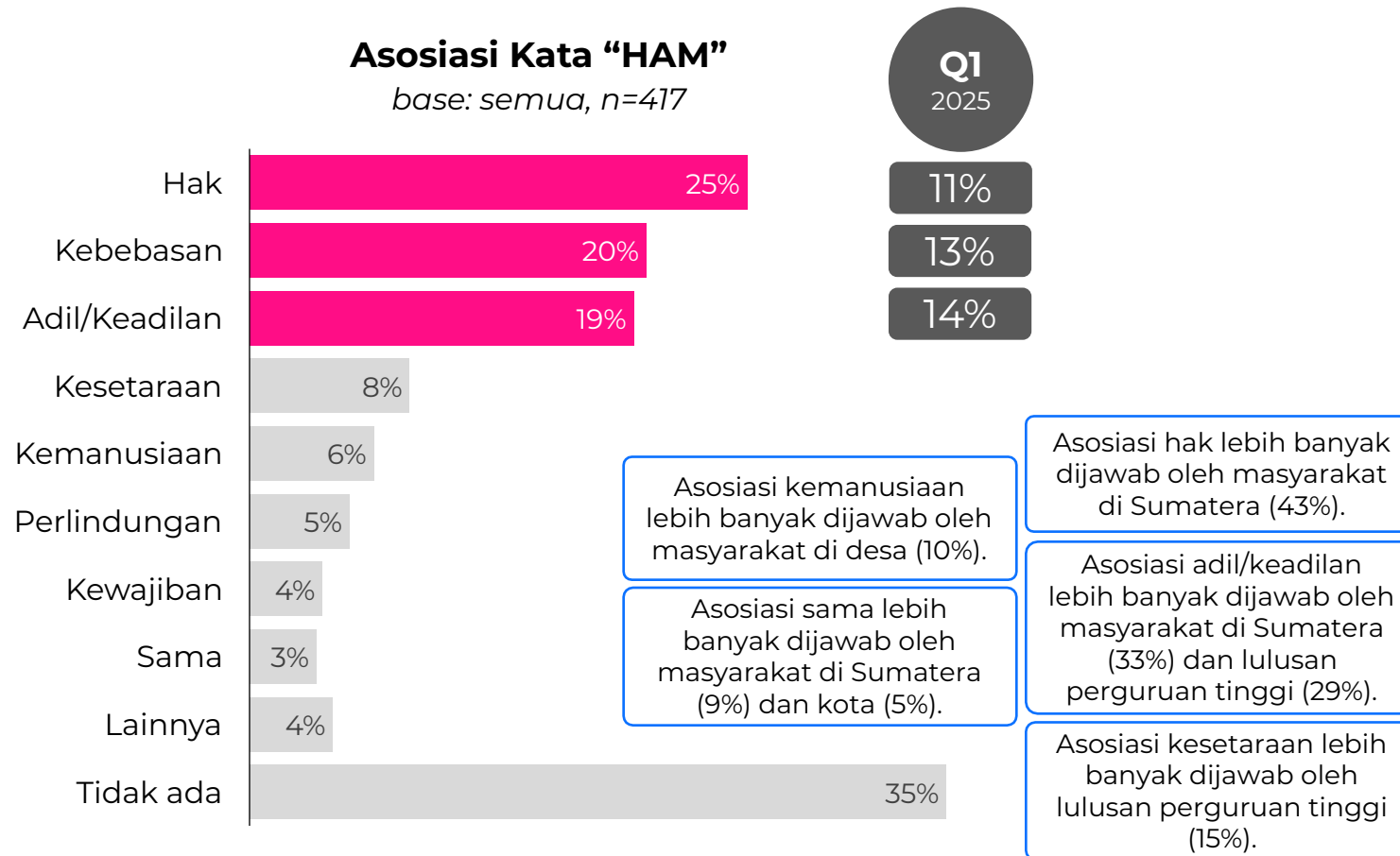
17%
12%
6%

Asosiasi hukuman mati/pelanggar hukum lebih banyak dijawab oleh masyarakat desa (29%).

Asosiasi pencuri/mencuri/maling lebih banyak dijawab oleh masyarakat kota (17%).

Asosiasi mengambil uang rakyat lebih banyak dijawab oleh masyarakat kota (11%).

Sepertiga masyarakat tidak bisa mengaitkan kata 'HAM'. Bagi yang bisa, paling banyak menjawab hak (25%), kebebasan (20%), dan keadilan (19%).



Sekitar sepertiga masyarakat masih kesulitan mengasosiasikan atau memahami konsep Hak Asasi Manusia. "Tidak tahu" (35%) masih menjadi respons paling dominan terkait asosiasi kata "HAM".

Meskipun demikian, di antara yang mampu mengasosiasikan, "Hak (hidup, beragama, warga negara, setiap orang, berpendapat, masyarakat, setiap manusia, kesehatan)" (25%) menjadi asosiasi terkuat.

Sementara itu, masyarakat juga mengasosiasikan "HAM" dengan "Kebebasan" (20%) dan "Keadilan" (19%).

1 dari 3 masyarakat mengasosiasikan 'lingkungan' dengan kebersihan

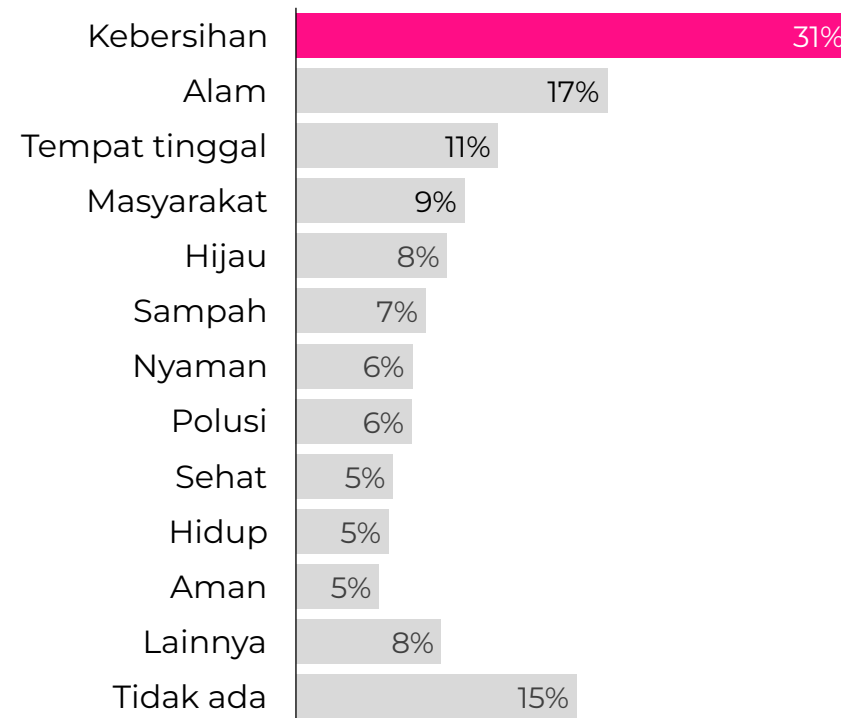
Masyarakat menunjukkan asosiasi yang jelas terhadap kata "Lingkungan". Tiga asosiasi teratas adalah "Kebersihan" (31%), "Alam" (17%), dan "Tempat tinggal" (11%).

Menariknya, terdapat perbedaan asosiasi berdasarkan gender; laki-laki secara signifikan lebih banyak mengasosiasikan lingkungan dengan "Kebersihan" (36%), sementara perempuan secara signifikan lebih mengasosiasikan lingkungan dengan "Hijau" (12%).

Proporsi responden yang menyatakan "Tidak tahu" untuk asosiasi kata ini relatif rendah, yakni 15%.

Asosiasi Kata "Lingkungan"

base: semua, n=417



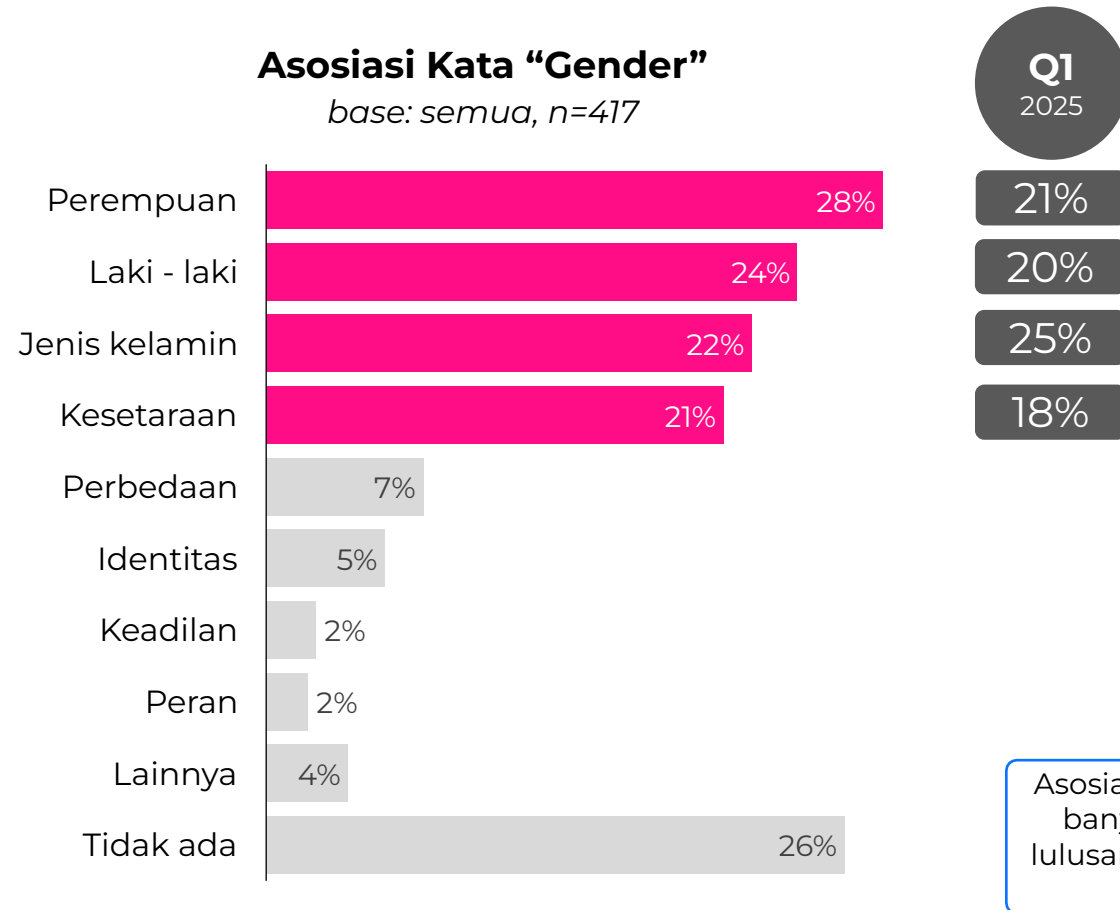
Asosiasi kebersihan lebih banyak dijawab oleh laki-laki (36%).

Asosiasi masyarakat lebih banyak dijawab oleh lulusan perguruan tinggi (18%).

Asosiasi hijau lebih banyak dijawab oleh perempuan (12%).

Asosiasi polusi lebih banyak dijawab oleh usia 25-34 tahun (11%).

Seperempat masyarakat tidak bisa mengaitkan kata 'gender'. Bagi yang bisa, mengaitkannya dengan perempuan (28%), laki-laki (24%), atau jenis kelamin (22%).



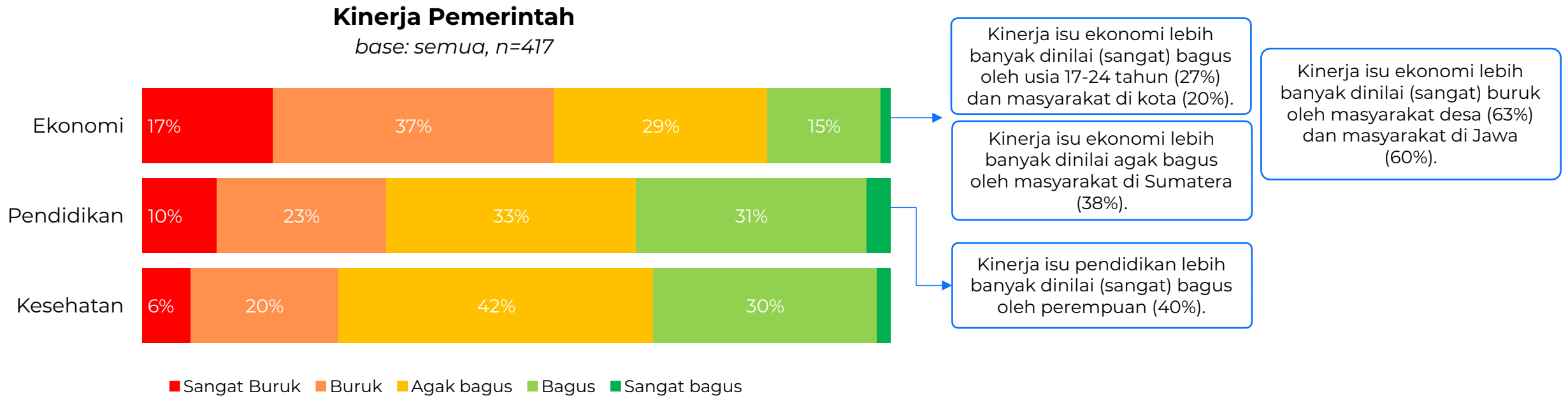
Temuan survei menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang "Gender" masih memerlukan peningkatan, di mana sekitar satu dari empat responden menyatakan "Tidak tahu". Di antara responden yang mampu mengasosiasikan, sebagian besar memberikan respons yang cenderung "dangkal" atau bersifat deskriptif dasar, dengan asosiasi tertinggi adalah "Perempuan" (28%), "Laki-laki" (24%), dan "Jenis Kelamin" (22%).

Namun, ada juga asosiasi yang lebih mendalam, yaitu "Kesetaraan" (21%), yang secara signifikan lebih banyak diasosiasikan oleh responden dari kelompok perguruan tinggi (32%).



② Penilaian Kinerja Pemerintah

Isu ekonomi secara signifikan dinilai (sangat) buruk oleh masyarakat pedesaan (63%) dan di Jawa (60%)



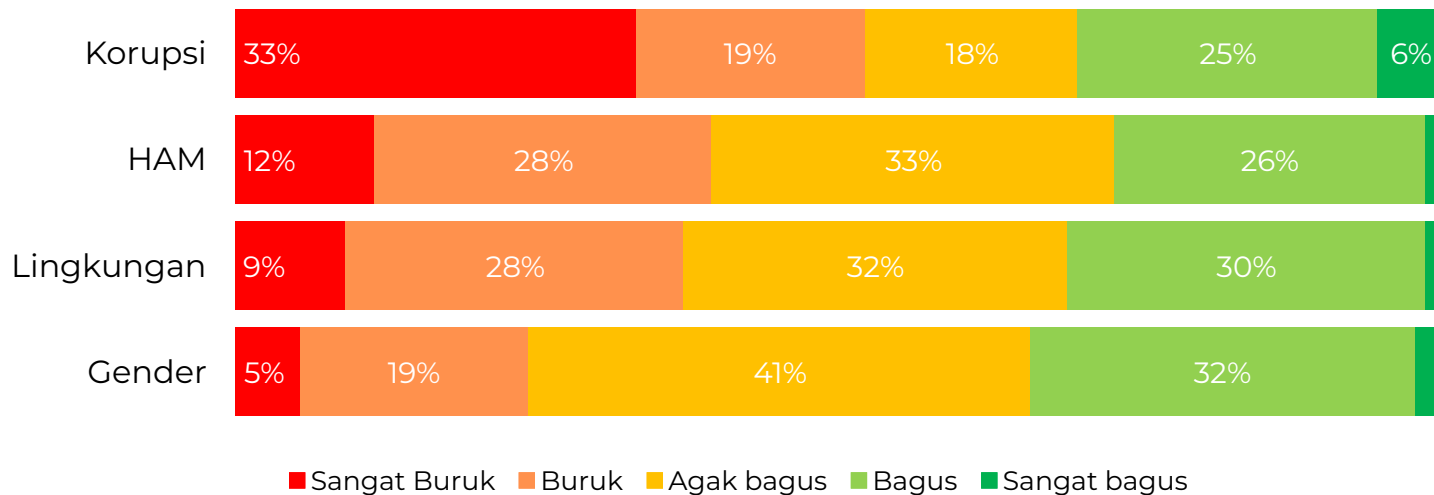
Pada Q2 2025, ekonomi (55%) menjadi isu dengan penilaian (sangat) buruk terbanyak. Kinerja isu ekonomi dinilai (sangat) buruk lebih banyak oleh masyarakat di desa (63%) dan di Jawa (60%).

Sementara itu, kinerja pemerintah pada isu pendidikan (33%) dan kesehatan (26%) juga mendapatkan penilaian (sangat) buruk dari masyarakat.

Mayoritas masyarakat (52%) menilai kinerja pemerintah pada isu korupsi (sangat) buruk

Kinerja Pemerintah (Isu Pilar Kawula17)

base: semua, n=417



Isu korupsi menjadi isu pilar Kawula17 dengan penilaian (sangat) buruk (52%) terbesar. Lulusan perguruan tinggi (66%), masyarakat di Jawa (60%), laki-laki (59%), dan masyarakat di desa (59%) lebih banyak menilai isu korupsi (sangat) buruk. Di sisi lain, penilaian pada isu gender oleh masyarakat bisa terjadi bias mengingat pemahaman masyarakat terhadap isu ini sangat terbatas.

Kinerja isu korupsi lebih banyak dinilai (sangat) bagus oleh perempuan (35%).

Kinerja isu korupsi lebih banyak dinilai agak bagus oleh lulusan sekolah menengah (20%) dan masyarakat di kota (22%).

Kinerja isu korupsi lebih banyak dinilai (sangat) buruk oleh lulusan perguruan tinggi (66%), masyarakat di Jawa (60%), laki-laki (59%) dan masyarakat di desa (59%).

Kinerja isu HAM lebih banyak dinilai agak bagus oleh lulusan sekolah menengah (29%).

Kinerja isu HAM lebih banyak dinilai (sangat) buruk oleh lulusan perguruan tinggi (54%) dan laki-laki (44%).

Kinerja isu lingkungan lebih banyak dinilai (sangat) buruk oleh lulusan perguruan tinggi (51%).

Kinerja isu gender lebih banyak dinilai (sangat) bagus oleh masyarakat di Sumatera (47%) dan usia 17-24 tahun (43%).

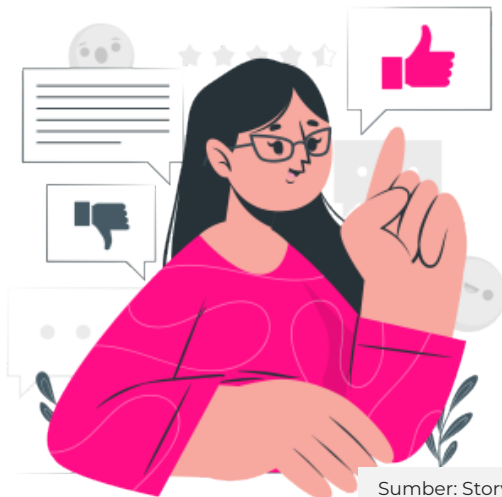
Kinerja isu gender lebih banyak dinilai (sangat) buruk oleh laki-laki (29%).

Cara membaca *NET Score*

NET Score

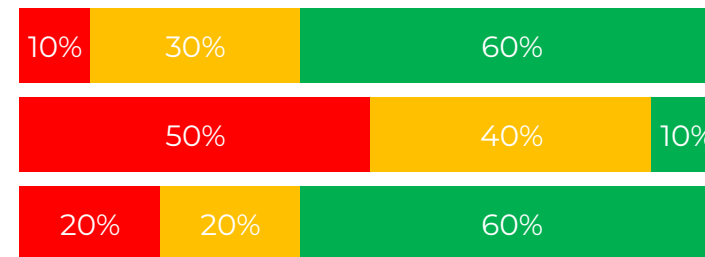
NET score digunakan untuk memberikan gambaran sederhana tentang seberapa puas/penting sebuah topik.

Skor ini diperoleh dengan **mengurangi jumlah respons positif (misalnya sangat puas) dengan respons negatif (misalnya sangat tidak puas).**



Sumber: Storyset

Contoh:



■ (Sangat) tidak puas ■ Agak puas ■ (Sangat) puas

NET Score

50%

-40%

40%

Penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah di bidang ekonomi menurun tajam (-32%) apabila dibandingkan dengan Q1 2025

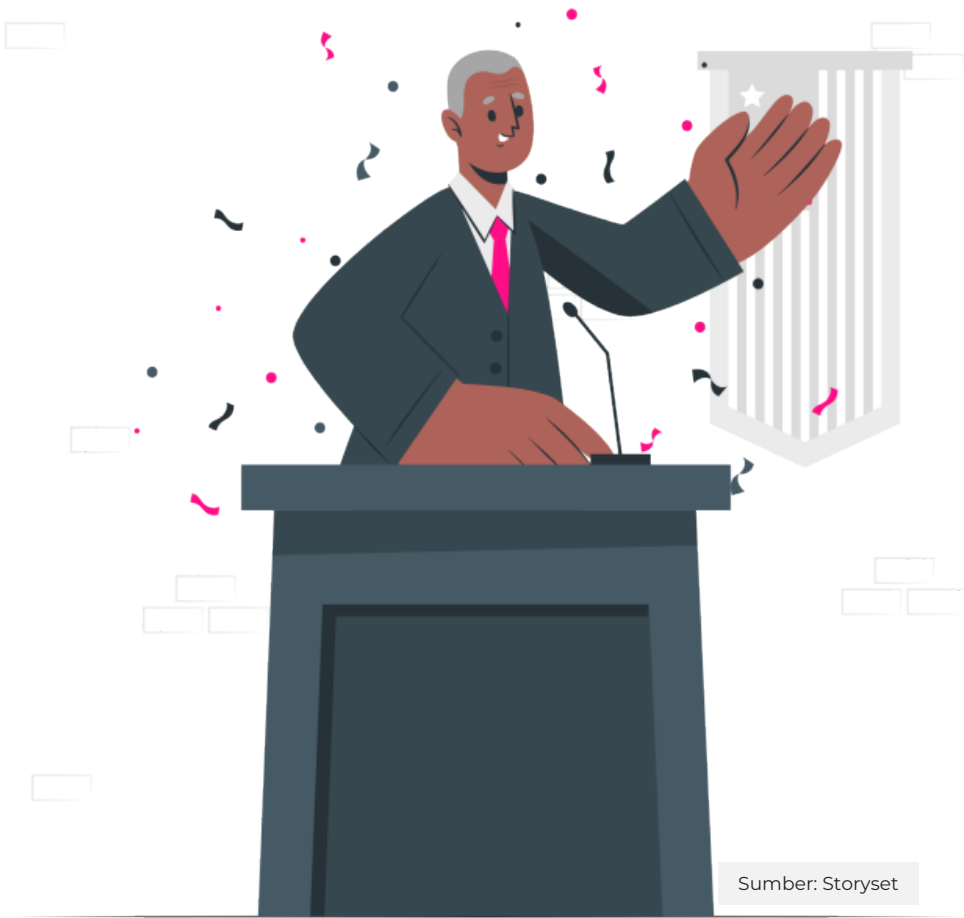


NET Score

	 Bottom 2	 Top 2					
Ekonomi	55%	16%	-39%	▼ -32%	-7%	-17%	-14%
Korupsi	52%	30%	-22%	▲ +27%	-49%	-87%	-72%
HAM	39%	27%	-12%		-14%	-20%	-29%
Lingkungan	37%	31%	-6%		-5%	-8%	-6%
Pendidikan	33%	34%	1%	▼ -15%	16%	14%	-9%
Kesehatan	26%	32%	5%	▲ +20%	-15%	19%	3%
Gender	24%	34%	10%	▼ -9%	19%	-9%	-

Isu ekonomi mengalami penurunan *NET score* yang signifikan (turun 32%) dari Q1, menjadi skor terendah dan banyak dinilai buruk oleh masyarakat Jawa (60%) serta desa (63%). Isu korupsi juga masih dinilai negatif (-22%), namun menunjukkan peningkatan sebesar 27% dari Q1.

Sementara itu, kesehatan menunjukkan peningkatan *NET score* yang positif menjadi 5% (+20%), meskipun pendidikan (1%) dan gender (10%) sedikit mengalami penurunan.



③ Ekspektasi terhadap Pemerintahan

Keyakinan terhadap pemenuhan program pemerintah menurun sebanyak 19% dari Q1 2025 (29%)

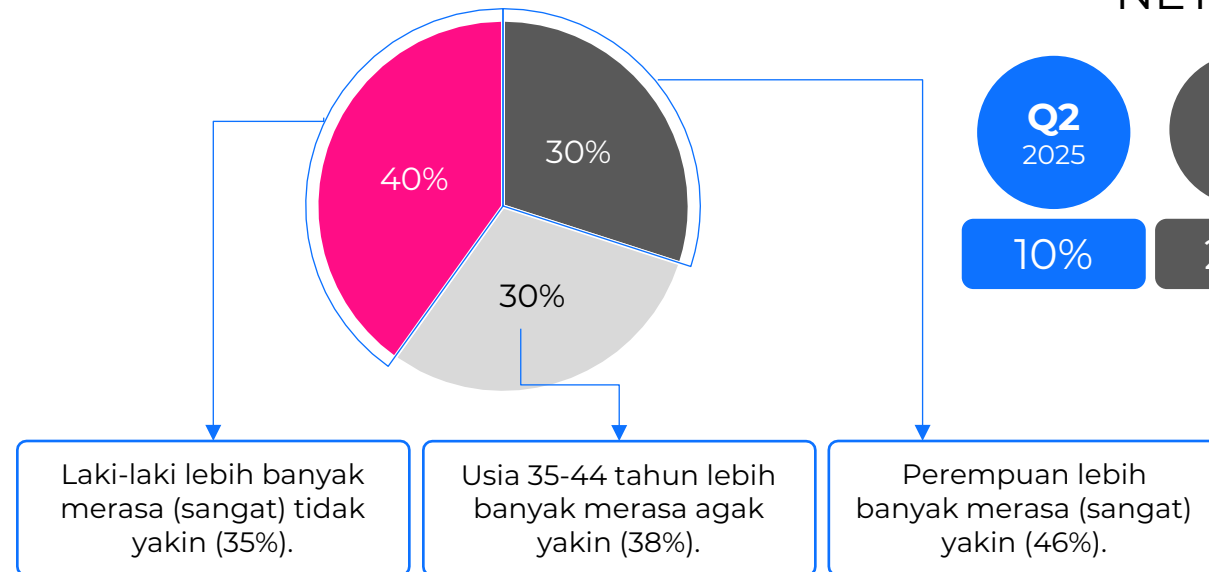
NET score keyakinan masyarakat terhadap pemerintahan memenuhi program-programnya mengalami penurunan dari Q1 2025 (29%) ke Q2 2025 (10%). Keyakinan ini merupakan terendah sejak satu tahun terakhir.

Penurunan keyakinan ini dapat dipengaruhi oleh pelaksanaan berbagai program yang mengalami kendala, seperti keracunan MBG, hingga permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi.

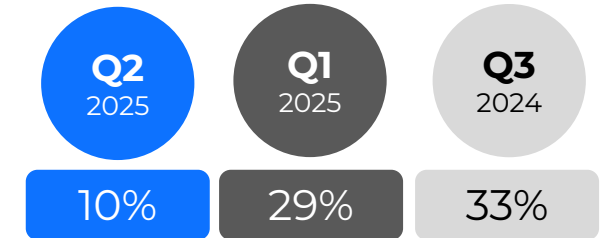
Keyakinan terhadap Pemerintah

base: semua, n=417

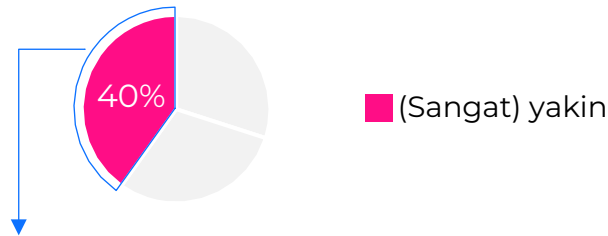
■ (Sangat) tidak yakin ■ Agak yakin ■ (Sangat) yakin



NET Score

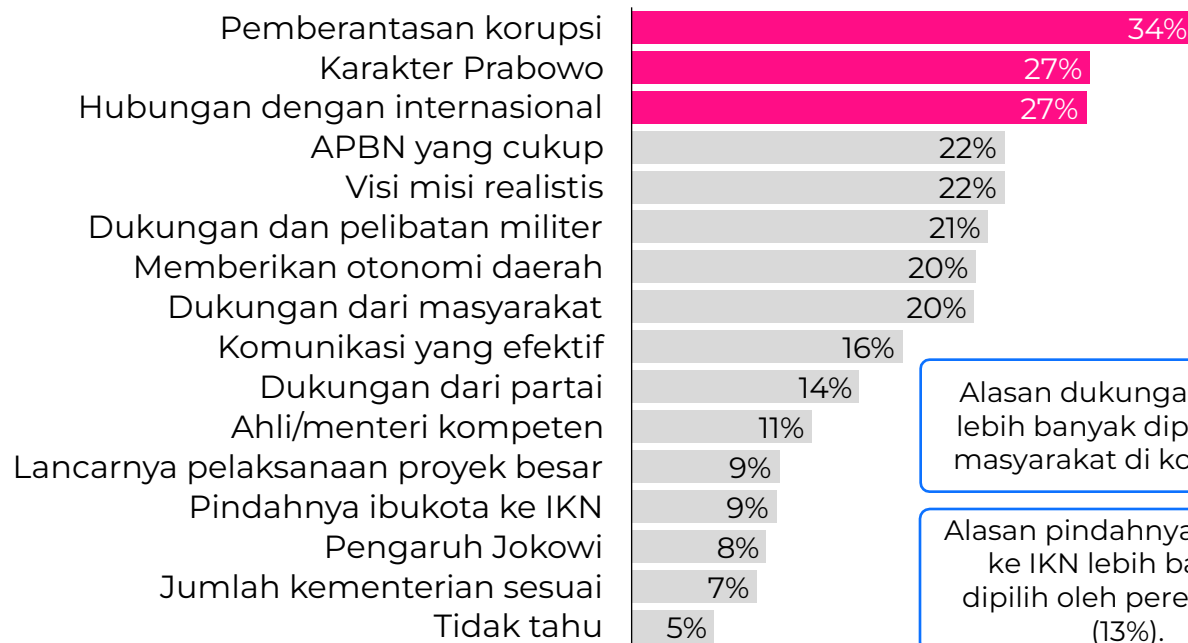


Masyarakat yang yakin dengan pemerintah melihat faktor pemberantasan korupsi (34%) dan karakter Prabowo (27%)



Alasan Yakin Pemerintah Memenuhi Janji

base: yakin dengan janji pemerintah, n=165



Alasan pemberantasan korupsi lebih banyak dipilih oleh masyarakat desa (41%).

Alasan hubungan dengan internasional lebih banyak dipilih oleh laki-laki (39%).

Alasan memberikan otonomi daerah lebih banyak dipilih oleh masyarakat di Jawa (33%) dan laki-laki (28%).

Alasan dukungan partai lebih banyak dipilih oleh masyarakat di kota (19%).

Alasan komunikasi yang efektif lebih banyak dipilih oleh usia 35-44 tahun (33%).

Alasan pindahnya ibukota ke IKN lebih banyak dipilih oleh perempuan (13%).

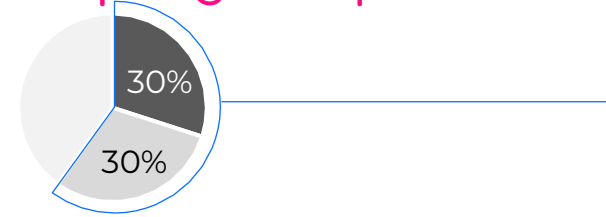
Alasan lancarnya pelaksanaan proyek lebih banyak dipilih oleh laki-laki (14%).

Masyarakat yang yakin dengan pemerintahan melihat faktor pemberantasan korupsi (34%) sebagai faktor utama. Pengungkapan beberapa kasus korupsi yang terjadi belakangan memantik kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Di sisi lain, karakter Prabowo (27%) dan hubungan dengan internasional (27%) menjadi alasan lain keyakinan masyarakat terhadap pemerintahan.

Masyarakat yang tidak yakin paling menyoroti masalah korupsi dan penyalahgunaan dana dalam pelaksanaan program pemerintah (52%)

■ Agak yakin
■ (Sangat) tidak yakin



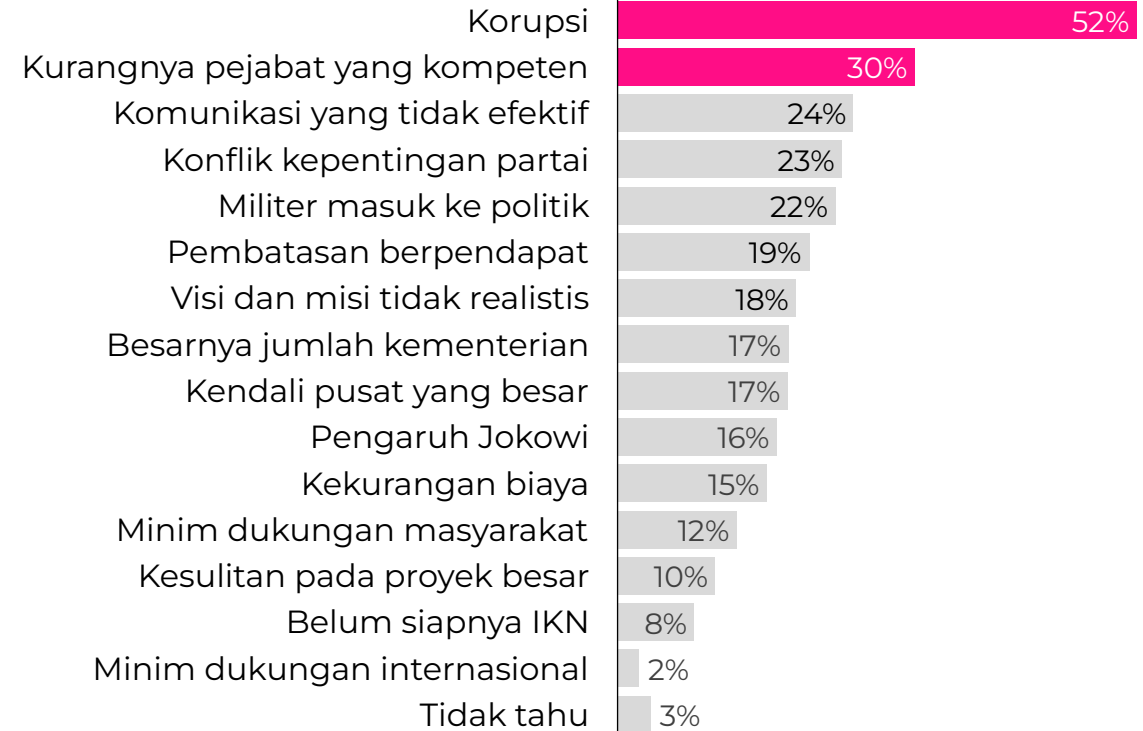
Alasan Tidak Yakin Pemerintah Memenuhi Janji

base: tidak yakin dengan janji pemerintah, n=252

Permasalahan korupsi juga menjadi alasan masyarakat tidak yakin dengan pemerintahan. Hal ini dapat disebabkan oleh masyarakat yang menganggap banyaknya pengungkapan kasus korupsi yang terjadi beberapa waktu lalu sebagai gagalnya pemerintah mencegah terjadinya kasus korupsi.

Selain itu, kurangnya pejabat kompeten di pemerintahan juga menjadi alasan lain masyarakat tidak yakin dengan pemerintahan.

- Alasan pemberantasan korupsi lebih banyak dipilih oleh masyarakat desa (61%).
- Alasan konflik kepentingan partai lebih banyak dipilih oleh masyarakat di Sumatera (37%).
- Alasan militer masuk ke politik lebih banyak dipilih oleh lulusan perguruan tinggi (35%).
- Alasan pembatasan berpendapat lebih banyak dipilih oleh masyarakat desa (28%).
- Alasan kendali pusat yang besar lebih banyak dipilih oleh masyarakat di kota (22%).



Program *Quick Win* Pemerintah

Pemerintah menetapkan sejumlah program hasil terbaik cepat (*quick win*) di dalam dokumen visi misinya. Program-program tersebut adalah:

Makan Bergizi Gratis

Program ini merupakan inisiatif untuk menyediakan asupan gizi yang cukup dan seimbang bagi anak-anak Indonesia, khususnya di sekolah dan pesantren yang bertujuan untuk mengatasi masalah stunting dan gizi buruk.

Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan preventif dan deteksi dini penyakit. Melalui program ini, masyarakat dapat secara rutin memeriksakan kondisi kesehatannya tanpa biaya.

Food Estate

Program *food estate* adalah pengembangan kawasan pertanian skala besar yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, dengan tujuan utama untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

Sekolah Unggulan Garuda

Program ini merupakan inisiatif untuk mendirikan dan mengembangkan sekolah-sekolah berkualitas tinggi di berbagai daerah, yang fokus pada peningkatan mutu pendidikan dan pencetakan lulusan berdaya saing global.

Kartu Kesejahteraan Sosial

Program ini dirancang untuk menyalurkan bantuan sosial secara lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Kartu ini akan mengintegrasikan berbagai jenis bantuan sosial pemerintah, seperti bantuan pangan, pendidikan, dan kesehatan, sehingga penyalurannya lebih efisien, transparan, dan mampu menjangkau langsung keluarga prasejahtera.

Menaikkan Gaji ASN

Kebijakan menaikkan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ASN, yang diharapkan berbanding lurus dengan peningkatan kinerja dan profesionalisme dalam melayani masyarakat.

Membangun Infrastruktur

Program membangun infrastruktur akan melanjutkan dan mempercepat pembangunan sarana dan prasarana dasar yang esensial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan konektivitas antarwilayah. Ini mencakup pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, serta infrastruktur energi dan digital.

Badan Penerimaan Negara

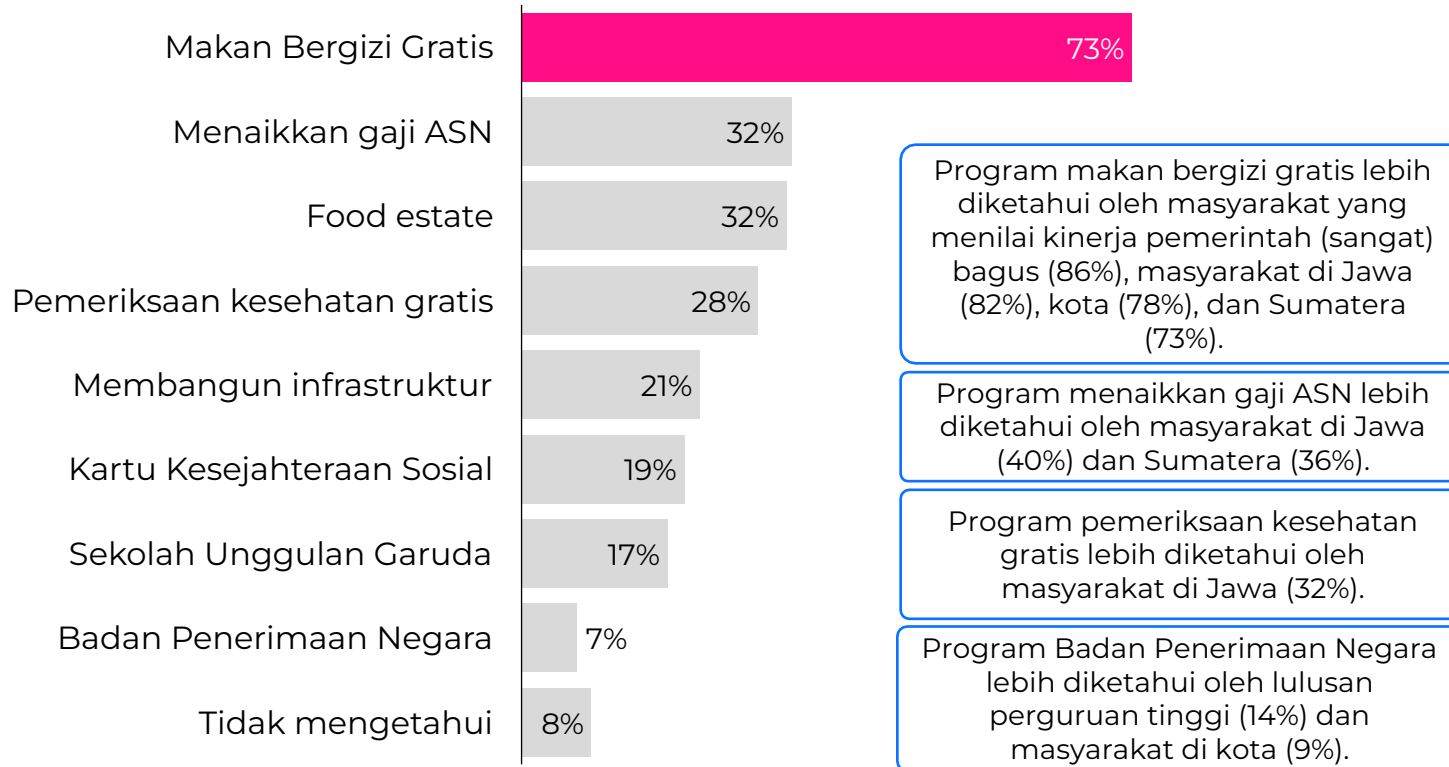
Pembentukan Badan Penerimaan Negara adalah langkah restrukturisasi untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari berbagai sektor, termasuk pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Seperti Q1 2025, Makan Bergizi Gratis (73%) masih menjadi program *quick win* pemerintah yang paling diketahui masyarakat



Mengetahui Program Quick Win Pemerintah

base: semua, n=417



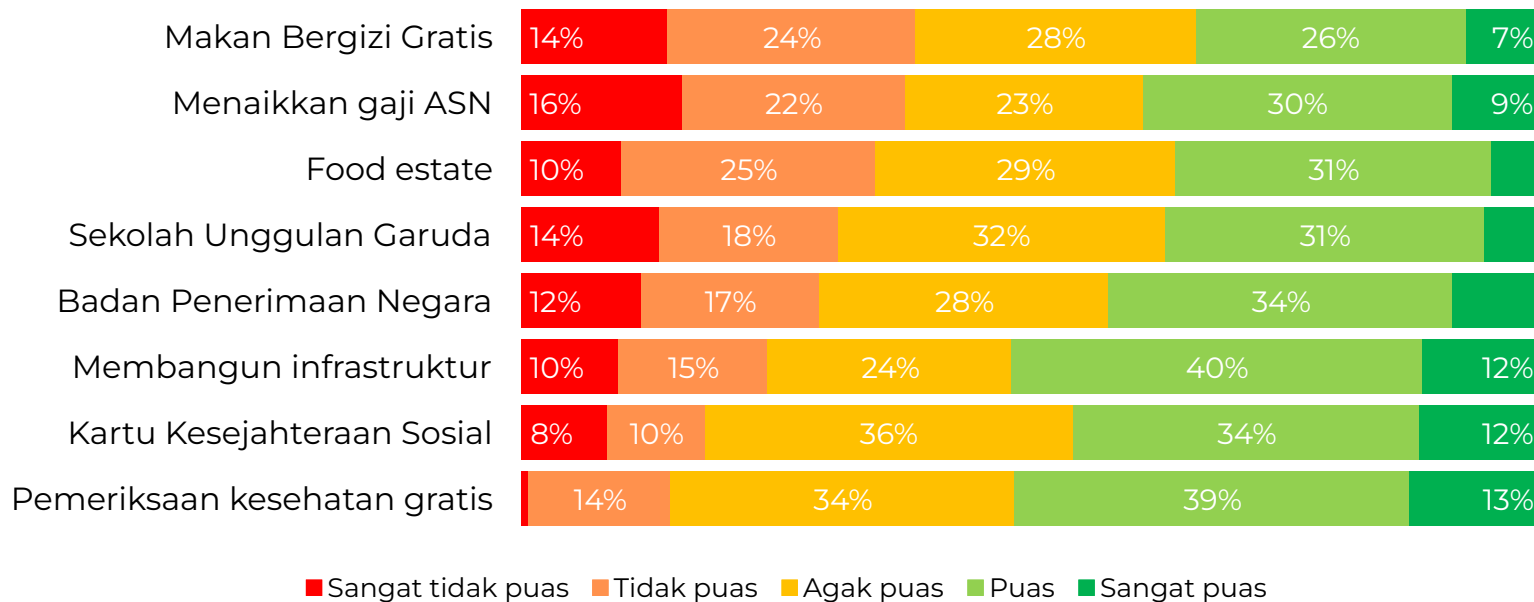
Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi program *quick win* pemerintah yang paling banyak diketahui masyarakat (73%). Pengetahuan tentang program ini lebih tinggi di kalangan masyarakat yang menilai kinerja pemerintah (sangat) bagus (86%), masyarakat di Jawa (82%) dan masyarakat desa (78%).

Program lainnya yang cukup dikenal adalah menaikkan gaji ASN (32%) dan *food estate* (32%). Hanya 8% responden yang menyatakan tidak mengetahui program *quick win* pemerintah sama sekali.

Banyak masyarakat yang merasa (sangat) tidak puas dengan program Makan Bergizi Gratis (38%), naiknya gaji ASN (38%), dan *food estate* (35%)

Kepuasan Program Quick Win Pemerintah

base: semua, n=variasi



Program menaikkan gaji ASN lebih banyak dinilai (sangat) puas oleh lulusan sekolah menengah (45%).

Program menaikkan gaji ASN lebih banyak dinilai (sangat) tidak puas oleh lulusan perguruan tinggi (57%).

Program *food estate* lebih banyak dinilai (sangat) tidak puas oleh masyarakat di desa (48%).

Program Sekolah Unggulan Garuda lebih banyak dinilai (sangat) puas oleh perempuan (52%).

Program Kartu Kesejahteraan Sosial lebih banyak dinilai (sangat) puas oleh masyarakat di kota (58%).

Program Kartu Kesejahteraan Sosial lebih banyak dinilai (sangat) tidak puas oleh perempuan (27%).

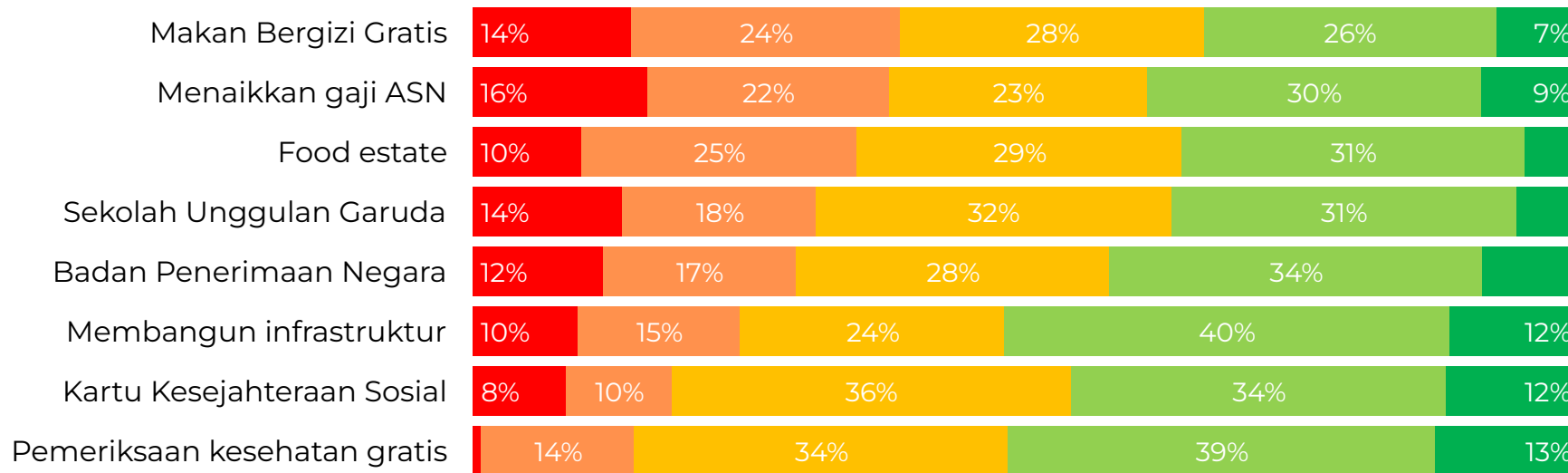
Program pemeriksaan kesehatan lebih banyak dinilai (sangat) puas oleh masyarakat di kota (62%).

Program pemeriksaan kesehatan lebih banyak dinilai (sangat) tidak puas oleh masyarakat desa (24%) dan lulusan perguruan tinggi (38%).

NET score program Makan Bergizi Gratis turun menjadi -5%, menunjukkan banyak masyarakat yang tidak puas terhadap pelaksanaannya

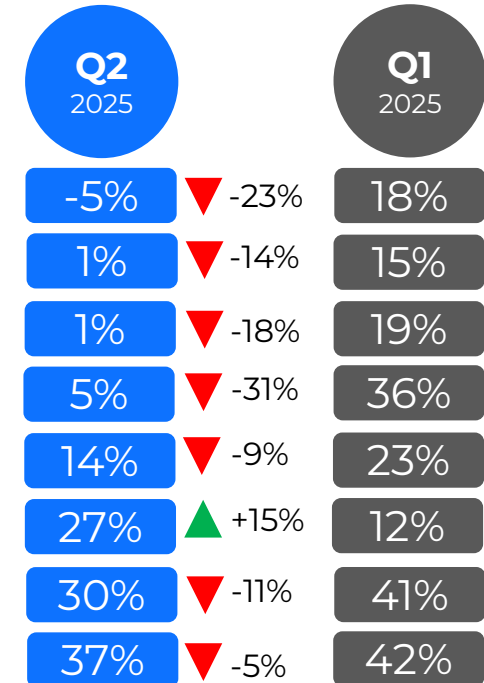
Kepuasan Program Quick Win Pemerintah

base: semua, n=variasi



■ Sangat tidak puas ■ Tidak puas ■ Agak puas ■ Puas ■ Sangat puas

NET Score



Secara keseluruhan, *NET score* kepuasan terhadap program *quick win* pemerintah pada Q2 2025 menurun secara signifikan. Program MBG mengalami penurunan *NET score* signifikan ke -5% (turun 23% dari Q1), mungkin dipengaruhi isu keracunan.

Program terkini Pemerintah

Selain program *quick win* yang tercantum di dalam dokumen visi misi. Pemerintah juga menetapkan sejumlah kebijakan lainnya. Beberapa kebijakan tersebut yang ditelusuri pada survei ini adalah:

Efisiensi Anggaran

Program efisiensi anggaran pemerintah bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan dana negara dengan menekan pengeluaran dan memprioritaskan alokasi anggaran pada sektor-sektor strategis. Namun, banyak sektor yang terganggu akibat efisiensi ini.

Danantara

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), merupakan sebuah badan pengelola investasi nasional yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan utama untuk mengelola aset negara dan mengoptimalkan investasi pemerintah.

Penjurusan di SMA

Kebijakan ini merupakan langkah untuk mengembalikan sistem penjurusan pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) guna memberikan fokus pendidikan yang lebih spesifik sesuai minat dan bakat siswa sejak dini.

Penghapusan TKDN

Rencana penghapusan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam beberapa sektor tertentu bertujuan untuk mendorong investasi asing dan mempercepat transfer teknologi, terutama di industri-industri strategis. Dengan mengurangi batasan TKDN, diharapkan Indonesia dapat menarik lebih banyak penanaman modal.

Penghapusan Kuota Impor

Kebijakan penghapusan kuota impor barang yang menyangkut hidup orang banyak berfokus pada penghapusan atau relaksasi kuota impor untuk komoditas esensial yang sangat dibutuhkan masyarakat, seperti bahan pangan demi menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan.

Bergabung ke BRICS

Keikutsertaan Indonesia dalam kelompok BRICS (Brazil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan) merupakan langkah pemerintah untuk memperkuat posisi geopolitik dan ekonomi Indonesia di kancah global.

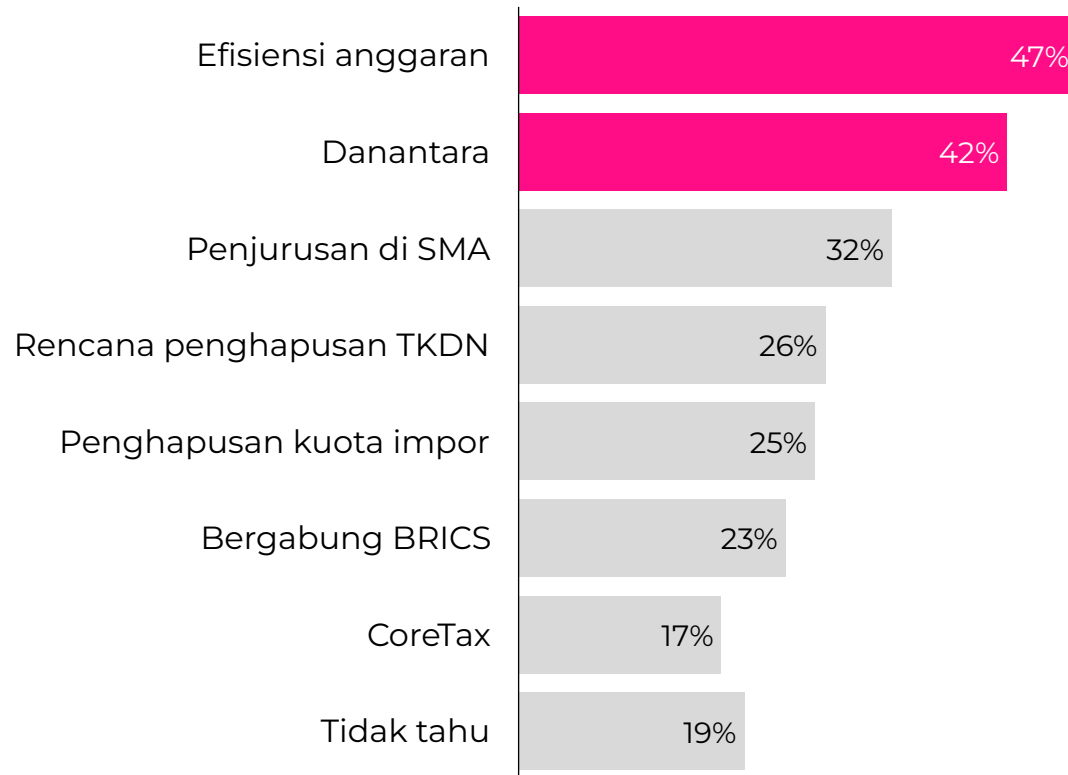
CoreTax

CoreTax adalah inisiatif modernisasi sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi dan berbasis teknologi, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan pajak di Indonesia. Namun, banyak masyarakat yang mengeluhkan buruknya kualitas aplikasi ini.

Efisiensi anggaran (47%) dan pembentukan Danantara (42%) merupakan kebijakan dan program yang paling diketahui masyarakat

Mengetahui Program Terkini Pemerintah

base: semua, n=417



Program efisiensi anggaran lebih diketahui oleh masyarakat di Jawa (54%) dan kota (52%).

Program Danantara lebih diketahui oleh masyarakat di Jawa (55%) dan laki-laki (47%).

Program penjurusan di SMA lebih diketahui oleh masyarakat di Jawa (43%).

Program penghapusan TKDN lebih diketahui oleh masyarakat di kota (31%).

Program penghapusan kuota impor lebih diketahui oleh masyarakat di Jawa (33%).

Program bergabung dengan BRICS lebih diketahui oleh laki-laki (27%) dan masyarakat di Jawa (33%).

Program CoreTax lebih diketahui oleh lulusan perguruan tinggi (30%).

Program-program terkini pemerintah lebih banyak diketahui oleh masyarakat di Jawa (2-3 program) ketimbang masyarakat di Sumatera (1-2 program).

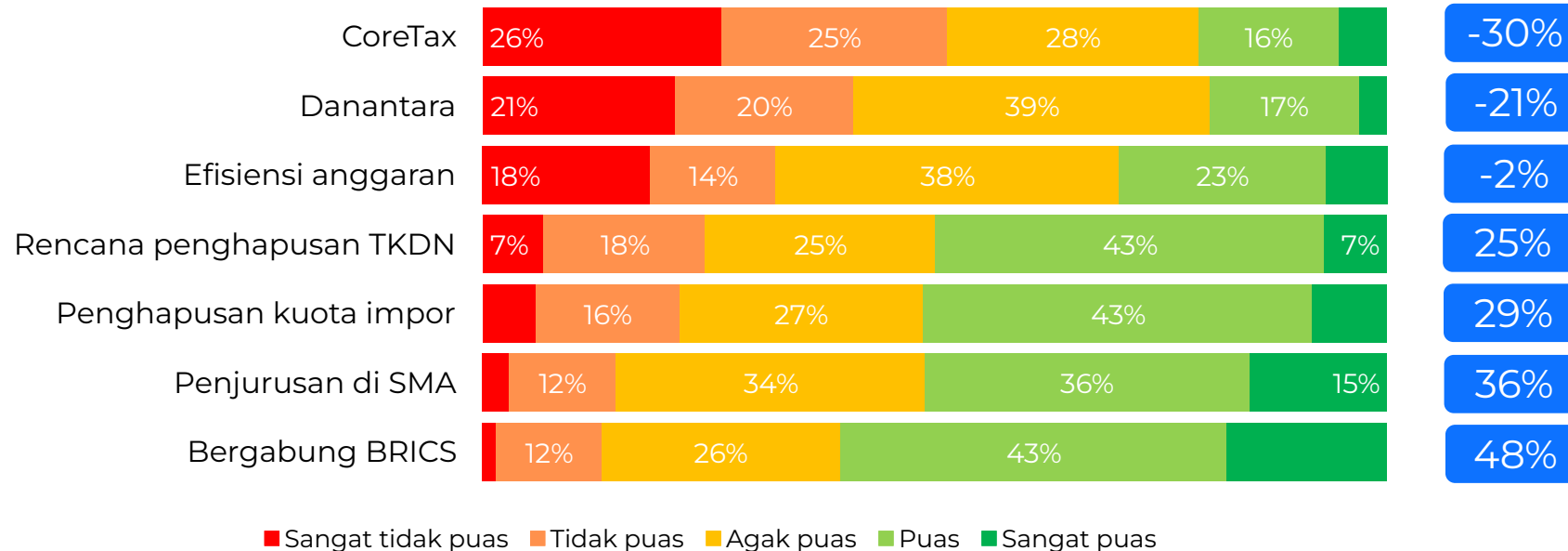
Program efisiensi anggaran adalah program terkini pemerintah yang paling banyak diketahui masyarakat (47%). Pengetahuan tentang program ini secara signifikan lebih banyak diketahui masyarakat perkotaan (52%). Program lain yang juga dikenal luas adalah Danantara (42%) dan kembalinya penjurusan di SMA (32%). Meski demikian, masih ada 19% masyarakat yang tidak mengetahui program terkini pemerintah sama sekali.

CoreTax, Danantara, dan efisiensi anggaran mendapatkan *NET Score* kepuasan negatif

NET Score

Kepuasan Program Terkini Pemerintah

base: semua, n=variasi



Program CoreTax lebih banyak dinilai agak puas oleh perempuan (39%).

Program penghapusan kuota impor lebih banyak dinilai (sangat) puas oleh perempuan (65%) dan lulusan sekolah menengah (58%)

Program Danantara lebih banyak dinilai (sangat) tidak puas oleh lulusan perguruan tinggi (60%) dan masyarakat di Jawa (47%).

Program penghapusan kuota impor lebih banyak dinilai agak puas oleh lulusan perguruan tinggi (64%).

Program efisiensi anggaran lebih banyak dinilai agak puas oleh lulusan sekolah menengah (42%).

Program penghapusan kuota impor lebih banyak dinilai (sangat) tidak puas oleh laki-laki (33%).

Program penghapusan TKDN lebih banyak dinilai (sangat) tidak puas oleh masyarakat di Jawa (64%).

Program penjurusan di SMA lebih banyak dinilai (sangat) puas oleh perempuan (60%).

Program bergabung dengan BRICS lebih banyak dinilai agak puas oleh masyarakat di kota (36%).

Program penjurusan di SMA lebih banyak dinilai (sangat) tidak puas oleh laki-laki (21%).

Program CoreTax menjadi program dengan ketidakpuasan terbanyak (51%). Hal ini dapat disebabkan oleh banyaknya masalah mengenai aplikasi ini yang dikeluhkan oleh pelapor pajak beberapa waktu lalu. Program Danantara (41%) dan efisiensi anggaran (32%) juga mendapatkan banyak ketidakpuasan.



4 Pantauan Partai Politik

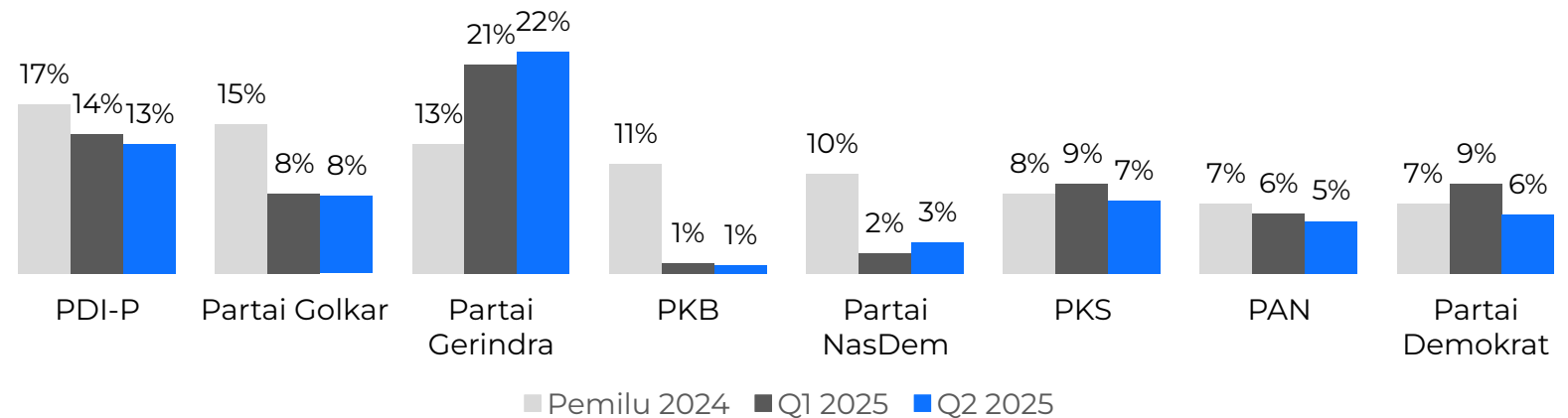
Preferensi masyarakat terhadap partai yang berada di parlemen tidak banyak berubah dari Q1 2025 ke Q2 2025

Tidak banyak perubahan suara partai dari Q1 2025. Namun, tren kenaikan suara Partai Gerindra nampak masih terus terjadi hingga di Q2 2025 ini.

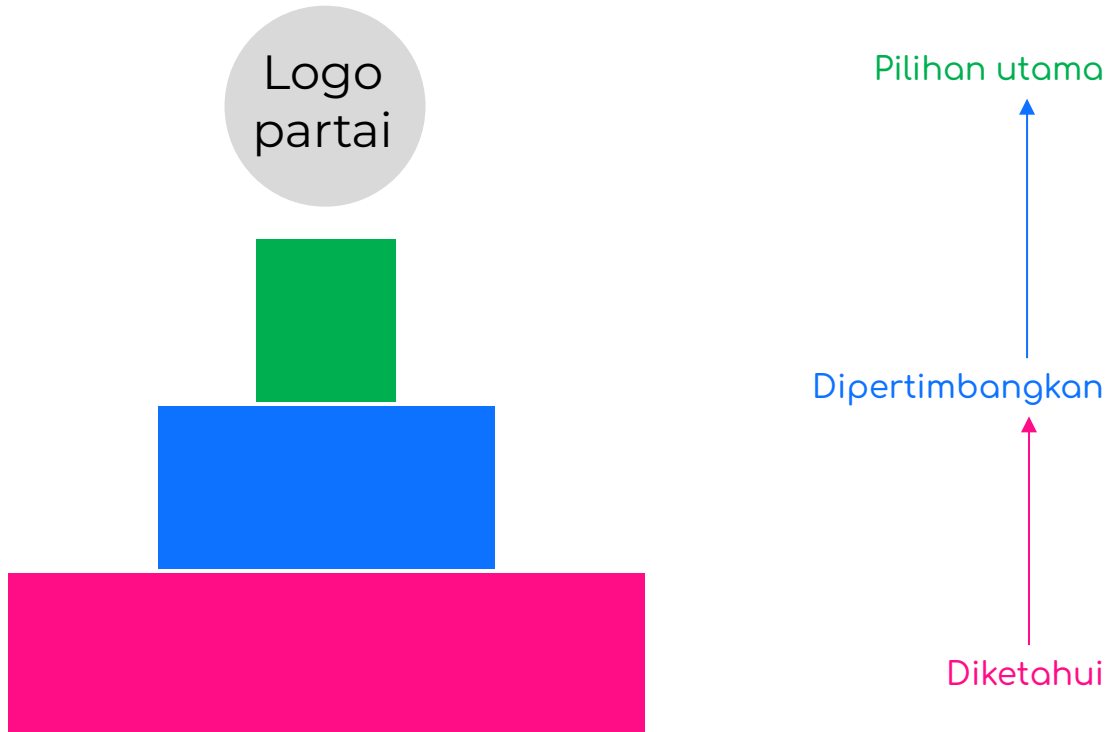
Selain suara Partai Gerindra, suara mayoritas partai lain mengalami penurunan dari hasil Pemilu Februari 2024. Penurunan suara paling besar dialami oleh PKB, Partai NasDem, dan Partai Golkar.

Preferensi Partai di Parlemen

base: semua, n=variasi



Cara membaca *funnel* partai politik



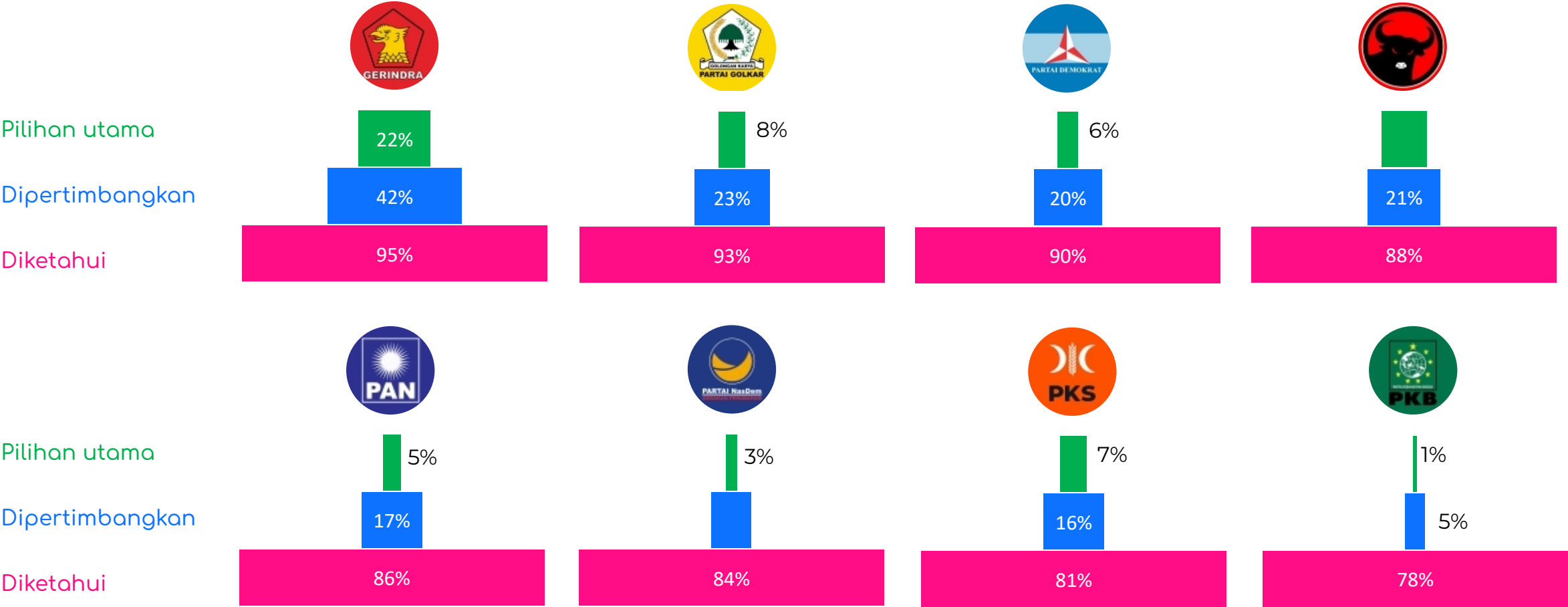
Persentase responden yang benar-benar memilih partai ini sebagai pilihan utama mereka. Responden yang bisa menjadikan partai tersebut sebagai pilihan utama hanya responden yang mempertimbangkan partai tersebut.

Persentase responden yang mempertimbangkan untuk memilih partai tersebut. Responden yang bisa mempertimbangkan partai tersebut hanya responden yang mengetahui partai tersebut.

Persentase responden yang mengenal partai ini, meskipun hanya sekadar tahu namanya. Semakin tinggi nilai persentase maka semakin dikenal partai tersebut.

Jika Pemilu diadakan hari ini, Gerindra (22%) dan PDIP (13%) menjadi partai politik yang paling banyak dipilih oleh masyarakat

Pantauan Partai Politik Parlemen
base: semua, n=variasi

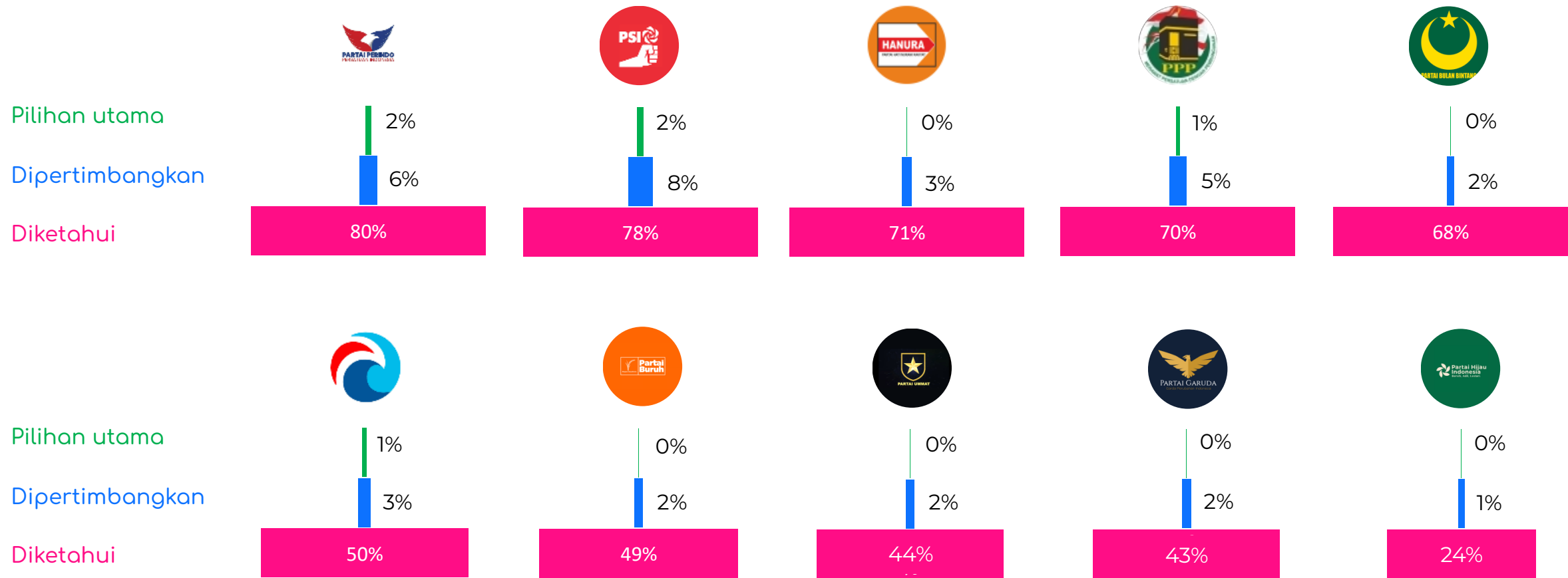


Q1 Manakah dari partai politik yang terdaftar di DPR di bawah ini yang kamu ketahui, meskipun hanya mengetahui namanya saja?
Q3 Jika pemilu diadakan hari ini, manakah dari partai politik di bawah ini yang kamu pertimbangkan untuk pilih?
Q4 Jika pemilu diadakan hari ini, partai mana yang akan menjadi pilihan utamamu?

Tidak ada partai non-parlemen yang melewati ambang batas 4% yang berpotensi lolos ke Senayan di Q2 2025 ini



Pantauan Partai Politik Non-Parlemen base: semua, n=variasi



Q1 Manakah dari partai politik yang terdaftar di DPR di bawah ini yang kamu ketahui, meskipun hanya mengetahui namanya saja?
 Q3 Jika pemilu diadakan hari ini, manakah dari partai politik di bawah ini yang kamu pertimbangkan untuk pilih?
 Q4 Jika pemilu diadakan hari ini, partai mana yang akan menjadi pilihan utamamu?

Preferensi partai politik Q1 dan Q2 2025

Perbandingan Preferensi Partai Politik

base: semua, n=variasi

Partai Politik	Diketahui		Dipertimbangkan		Pilihan Utama	
	Q2 2025	Q1 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q2 2025	Q1 2025
Partai Gerindra	95%	95%	42%	50%	22%	21%
Partai Golkar	93%	86%	23%	22%	8%	8%
Partai Demokrat	90%	89%	20%	22%	6%	9%
PDIP	88%	95%	21%	30%	13%	14%
PAN	86%	91%	17%	23%	5%	6%
Partai NasDem	84%	88%	11%	17%	3%	2%
PKS	81%	78%	16%	20%	7%	9%
PKB	78%	76%	5%	12%	1%	1%

Kenaikan signifikan
dari Q1 2025

Penurunan signifikan
dari Q1 2025

Q1 Manakah dari partai politik yang terdaftar di DPR di bawah ini yang kamu ketahui, meskipun hanya mengetahui namanya saja?

Q3 Jika pemilu diadakan hari ini, manakah dari partai politik di bawah ini yang kamu pertimbangkan untuk pilih?

Q4 Jika pemilu diadakan hari ini, partai mana yang akan menjadi pilihan utamamu?



5 Opini Publik dalam RUU Berjalan

Indeks Partai Politik

Indeks Partai Politik adalah sistem penilaian yang mengukur sejauh mana sikap partai politik selaras dengan preferensi masyarakat terhadap suatu isu. Skor diberikan berdasarkan tingkat kesesuaian posisi partai dengan opini publik, di mana partai yang lebih selaras dengan mayoritas masyarakat mendapat skor lebih tinggi, sementara yang berseberangan mendapat skor lebih rendah.

Indeks Partai Politik pada NKS Q2 2025 ditentukan berdasarkan sikap partai politik dan opini masyarakat terhadap UU Tentara Nasional Indonesia, RUU Kejaksaan, RKUHAP, RUU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, RUU Aparatur Sipil Negara, dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.



Partai Demokrat (37,8), Partai NasDem (37,8), dan PKB (37,6) merupakan tiga partai politik dengan sikap yang paling relevan dengan opini publik saat ini

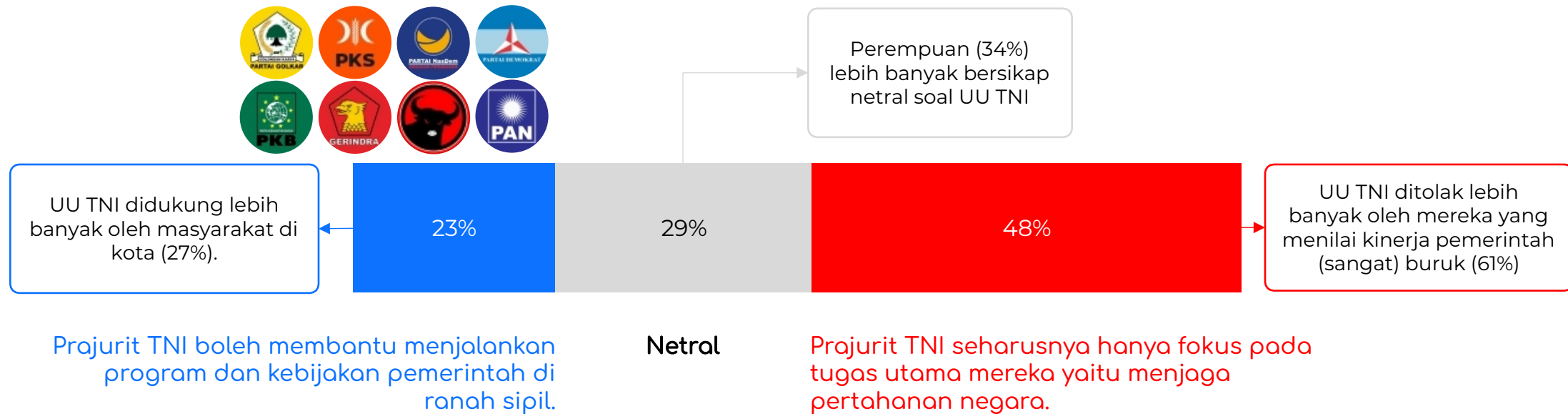
Indeks Partai Politik Parlemen

base: semua, n=417

Partai Politik	Skor Indeks Q2 2025	Skor Indeks Q1 2025
Partai Demokrat	37,8	35,5
Partai NasDem	37,8	61,0
PKB	37,6	61,0
PDIP	36,5	28,9
Partai Golkar	36,5	31,1
PKS	35,5	61,1
Partai Gerindra	31,7	46,2
PAN	27,9	35,6

Partai Demokrat dan NasDem memimpin dengan indeks 37,8, diikuti PKB (37,6), serta PDI Perjuangan dan Golkar (36,5). Kemiripan poin antar partai ini secara umum merefleksikan posisi sejalan mereka dalam RUU Prolegnas. Secara umum, nilai indeks ini menurun dari Q1 2025.

1 dari 2 masyarakat menolak perubahan yang terjadi pada UU TNI

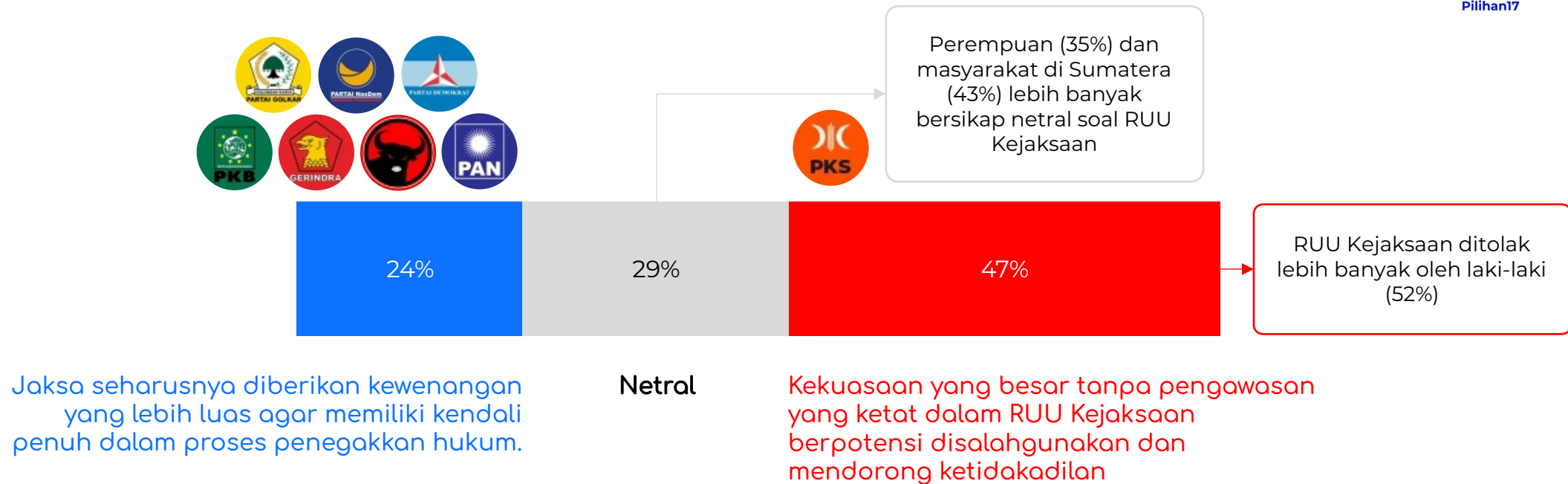


UU Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah undang-undang yang bertujuan untuk merevisi dan memperbarui dasar hukum yang mengatur keberadaan, fungsi, tugas, dan organisasi Tentara Nasional Indonesia. Beberapa poin penting yang sering menjadi sorotan dalam RUU ini adalah:

- Peran dan Fungsi TNI di Ranah Sipil:** UU ini berpotensi memperluas peran TNI dalam membantu tugas-tugas sipil, seperti penanggulangan bencana, pengamanan objek vital nasional, atau mendukung pembangunan daerah. Hal ini dikhawatirkan mengganggu profesionalisme prajurit.
- Penambahan Usia Pensiun Prajurit:** Salah satu isu krusial adalah penambahan batas usia pensiun bagi prajurit TNI, dengan tujuan mengoptimalkan pengalaman dan keahlian prajurit senior serta mendukung kesinambungan karier mereka.

UU ini merupakan inisiatif DPR untuk menyesuaikan regulasi TNI dengan dinamika perkembangan zaman dan kebutuhan pertahanan negara. Namun, pengesahan UU ini mendapatkan banyak penolakan dari berbagai lapisan masyarakat.

1 dari 2 orang menolak isi RUU Kejaksaan

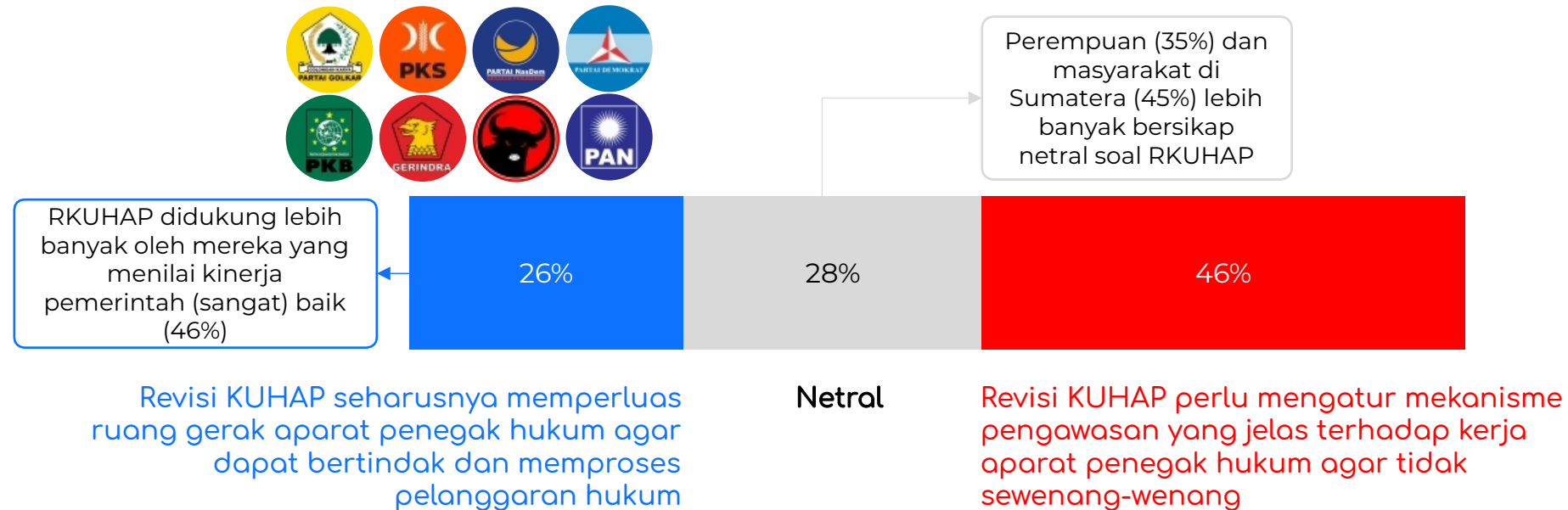


RUU Kejaksaan adalah rancangan undang-undang yang bertujuan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, guna memperkuat posisi dan kewenangan Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia. Pembahasan. Beberapa poin penting dan kontroversi yang mencuat dalam RUU ini antara lain:

- 1. Perluasan Kewenangan:** RUU ini mengusulkan penambahan kewenangan Kejaksaan, seperti dalam intelijen penegakan hukum dan pemulihan aset. Ini dikhawatirkan dapat tumpang tindih dengan lembaga lain dan berpotensi penyalahgunaan wewenang.
- 2. Hak Imunitas Jaksa:** Adanya usulan hak imunitas dan perlindungan bagi Jaksa, yang dikritik karena dianggap bisa mengurangi akuntabilitas dan menciptakan impunitas.

RUU ini masih dalam pembahasan dan terus menjadi sorotan publik. Berbagai lapisan masyarakat mengkritisi isi RUU ini karena tidak sesuai dengan prinsip keadilan hukum.

1 dari 2 orang menekankan pentingnya mekanisme pengawasan yang jelas terhadap kinerja aparat penegak hukum

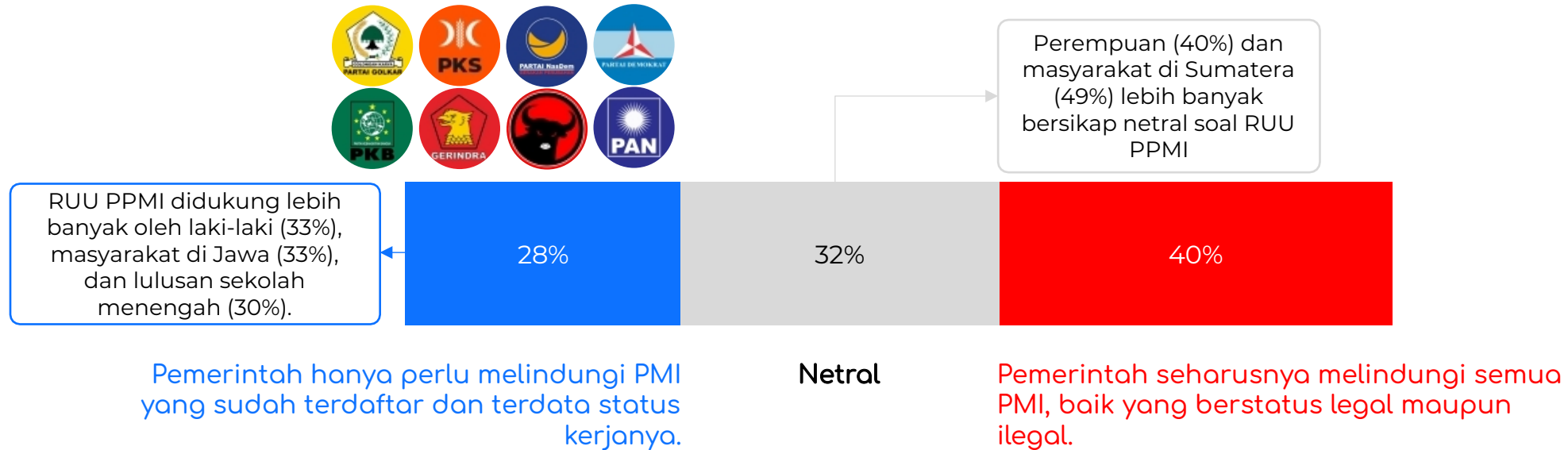


RKHAP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) adalah upaya pembaruan KUHP yang sudah tua, bertujuan menyempurnakan prosedur penegakan hukum di Indonesia. Namun, pembahasannya masih diwarnai pro-kontra:

- Pembatasan Hak Tersangka/Terdakwa:** Salah satu kekhawatiran utama adalah potensi pembatasan hak bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa, terutama di tahap awal proses.
- Kewenangan Penahanan dan Penyadapan:** RKUHAP juga menjadi sorotan terkait perluasan kewenangan penahanan tanpa persetujuan pengadilan dalam kasus-kasus tertentu, serta aturan penyadapan yang dianggap masih abu-abu dan berpotensi disalahgunakan tanpa pengawasan yang ketat.

RKHAP diharapkan membawa perbaikan signifikan dalam sistem peradilan pidana, namun kontroversi seputar hak asasi, pengawasan, dan potensi penyalahgunaan kewenangan masih menjadi tantangan besar dalam proses penyusunannya.

40% masyarakat mendukung perlindungan terhadap semua Pekerja Migran, terlepas dari status legalitasnya

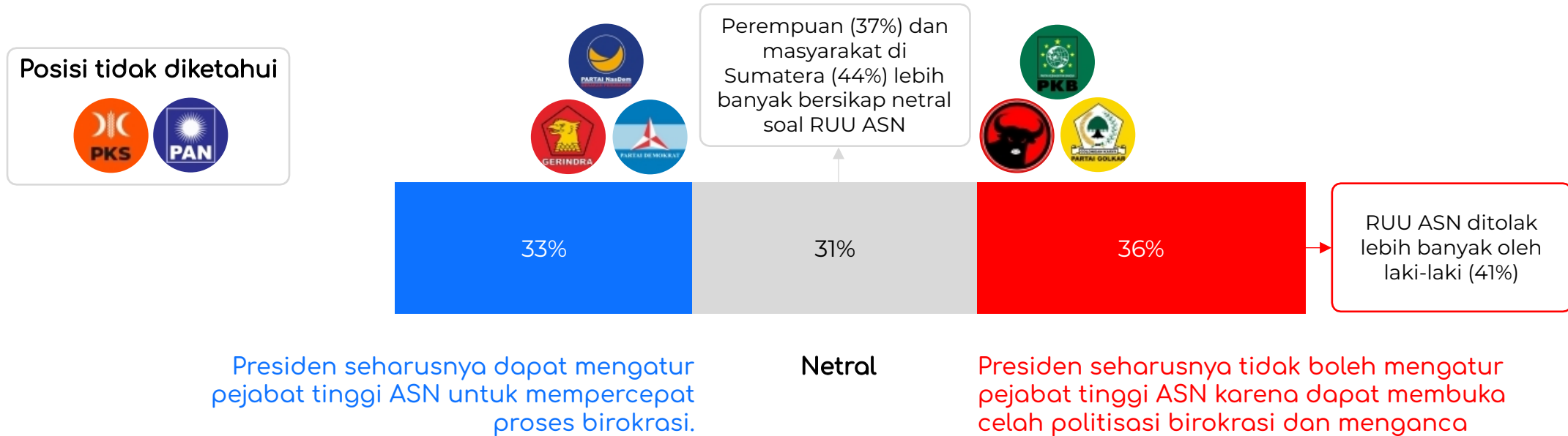


RUU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) adalah revisi UU No. 18 Tahun 2017 untuk perkuat perlindungan PMI. Tujuannya adalah memperkuat perlindungan bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri, dari pra-penempatan hingga purna-penempatan. Namun, masih banyak kontroversi:

- 1. Pekerja Migran Non-Prosedural Belum Teratur:** RUU ini belum mengatur dengan jelas penanganan puluhan ribu PMI non-prosedural yang sering bermasalah dan rentan eksploitasi.
- 2. Mekanisme Pengaduan Kurang Efektif:** Meski ada sistem satu pintu, mekanisme pengaduan dan penegakan hukum masih diragukan efektifitasnya, padahal kasus kekerasan pada PMI masih tinggi.

RUU PPMI ini masih dalam pembahasan dan diharapkan segera disahkan, meski banyak pihak yang mengkritisi isi RUU tersebut.

Hampir 2 dari 5 orang berpendapat bahwa presiden tidak seharusnya dapat mengatur pejabat tinggi ASN

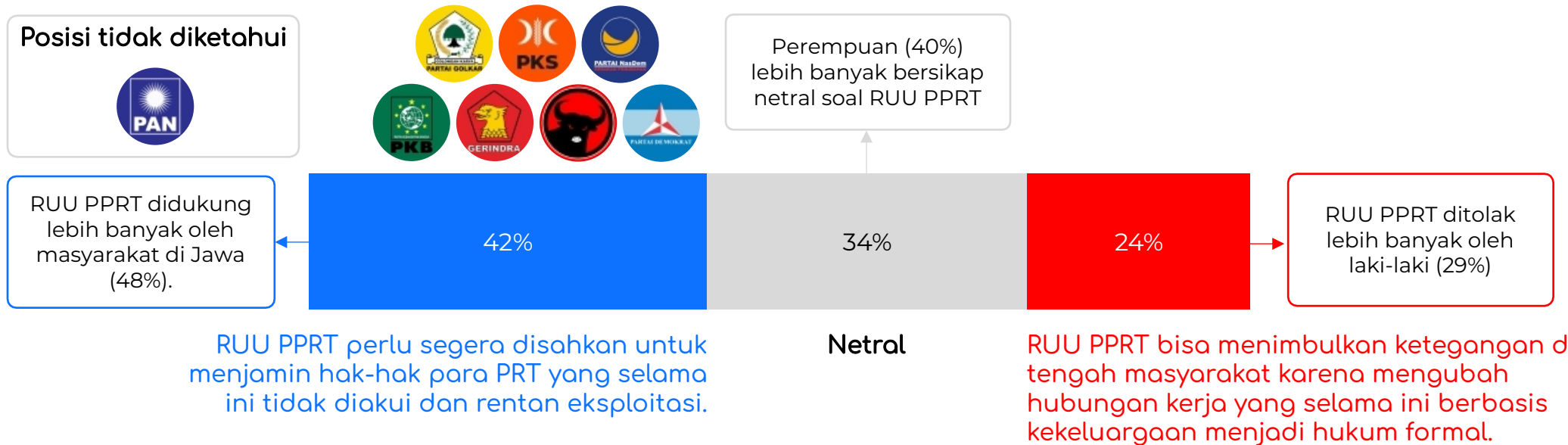


RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah revisi UU No. 5 Tahun 2014 untuk modernisasi manajemen ASN. Namun, RUU ini penuh kontroversi:

- Pengangkatan ASN oleh Presiden:** Adanya usulan kewenangan Presiden mengangkat dan memberhentikan ASN di jabatan tertentu, yang memicu kekhawatiran akan intervensi politik dan melemahnya sistem merit, serta potensi penyalahgunaan kekuasaan.
- Nasib Honorer Belum Jelas:** RUU ini bertujuan selesaikan masalah jutaan tenaga honorer, tapi skema pengangkatan dan status PPPK vs. PNS masih jadi perdebatan, dikhawatirkan tidak merata atau timbul masalah baru.

RUU ASN ini merupakan prioritas dalam legislasi dan diharapkan segera disahkan, namun berbagai masukan dan kritik terus mengalir untuk memastikan RUU ini benar-benar membawa perbaikan bagi tata kelola ASN dan kesejahteraan pegawainya.

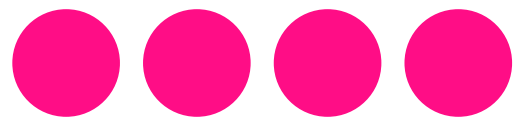
RUU PPRT didukung oleh sebagian besar masyarakat



RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) adalah rancangan undang-undang yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan pengakuan terhadap pekerja rumah tangga di Indonesia. Beberapa poin penting dalam RUU ini adalah:

- 1. Pengakuan dan Perlindungan:** RUU ini mengakui pekerja rumah tangga sebagai pekerja yang berhak mendapatkan perlindungan hukum, upah yang adil, dan kondisi kerja yang layak.
- 2. Pengawasan dan Penegakan Hukum:** RUU ini mengatur tentang pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan hak-hak pekerja rumah tangga terlindungi.

RUU ini telah lama diperjuangkan dan masih dalam tahap pembahasan. Banyak pihak mendesak agar RUU ini segera disahkan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja rumah tangga di Indonesia.



Lampiran



Indeks Partai Politik Berdasarkan Demografi

base: semua, n=417

Partai Politik	Skor Indeks Q2 2025	Jenis Kelamin		Usia (tahun)			Pendidikan		Pulau				
		Laki-laki	Perempuan	17-24	25-34	35-44	SMP/SMA /sederajat	Perguruan Tinggi	Sumatera	Jawa	Bali dan Nusa Tenggara	Kalimantan	Sulawesi
Partai Demokrat	37,8	37,4	38,2	36,6	36,2	40,4	38,2	34,8	35,3	40,6	32,1	36,5	31,0
Partai NasDem	37,8	37,4	38,2	36,6	36,2	40,4	38,2	34,8	35,3	40,6	32,1	36,5	31,0
PKB	37,6	38,3	36,8	34,1	36,3	42,0	38,2	34,1	35,2	40,1	33,5	34,6	33,6
PDIP	36,5	37,8	35,0	36,7	33,8	39,1	37,6	30,4	37,8	36,3	33,8	39,1	36,2
Partai Golkar	36,5	37,8	35,0	36,7	33,8	39,1	37,6	30,4	37,8	36,3	33,8	39,1	36,2
PKS	35,5	36,2	34,6	34,0	37,0	35,1	36,1	32,0	31,8	38,2	26,3	34,1	34,0
Partai Gerindra	31,7	32,2	31,2	31,0	31,5	32,5	31,8	31,2	25,2	35,5	26,3	31,7	27,6
PAN	27,9	27,7	28,2	28,2	25,7	30,0	28,2	26,4	26,6	29,2	26,7	28,3	23,6

Total

Signifikan lebih tinggi

Signifikan lebih rendah